ProstitusiMasihTetapAda Studi FenomenologisAmbiguitas Individu Birokrat Lapangan Dalam Implementasi Kebijakan

by Emy Kholifah Rachmaningsih

Submission date: 16-Mar-2021 08:20PM (UTC-0700)
Submission ID: 1535071212
File name: BUKU_PROSTITUS_A5_dengan_cover.pdf (7.67M)
Word count: 76371
Character count: 490580

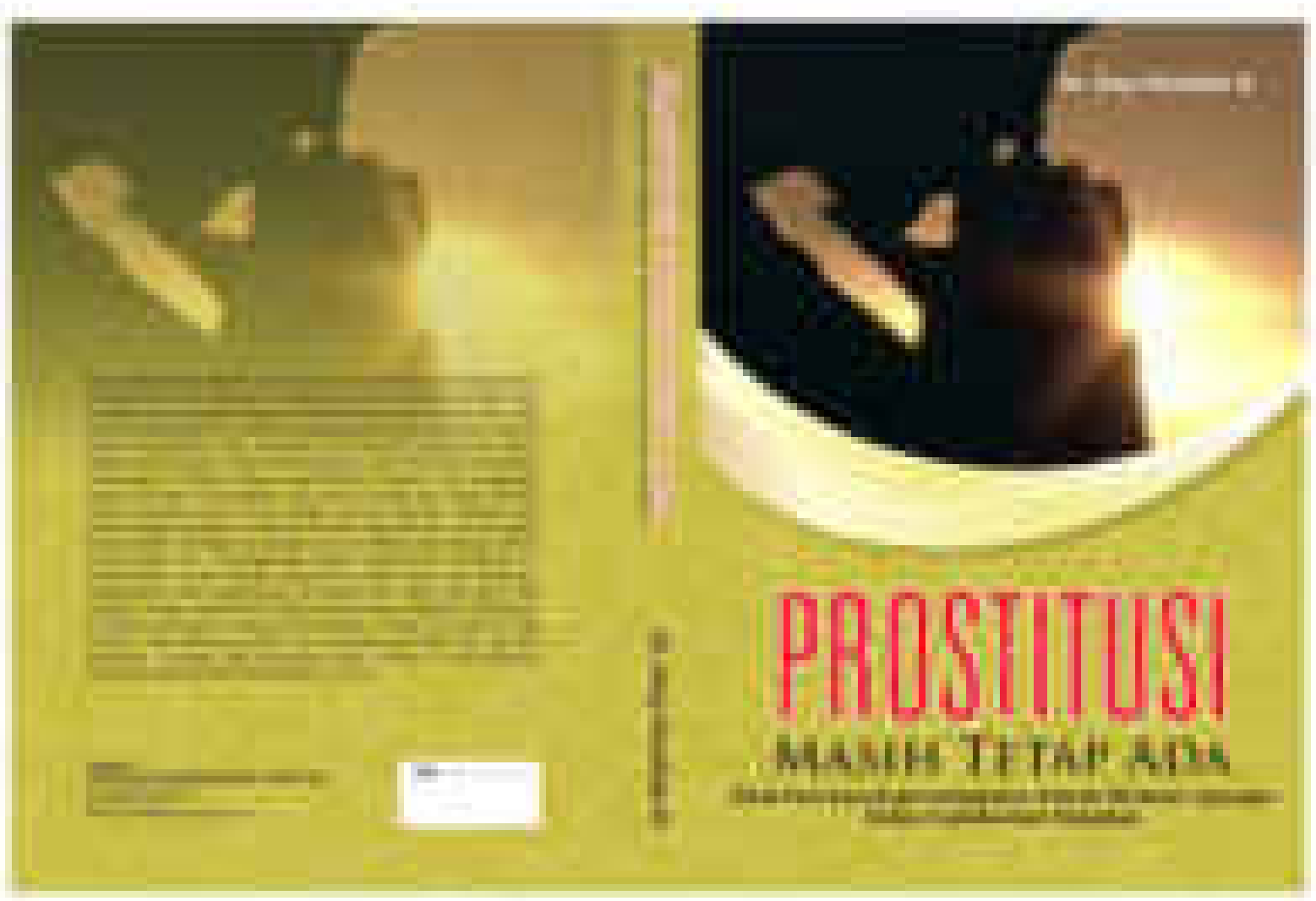
PROSTITUSI
MASIH TETAP ADA

Prostitusi Masih Tetap Ada

Studi Fenomenologis Kehidupan Sosial Ekonomi Lingkungan Eks-Lokalisasi Kramat Tunggak

Dr. Eny Kholifah S.

Prostitusi Masih Tetap Ada

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Daftar Isi

Halaman Judul i
Pengesahan ii
Surat Pernyataan iii
Motto dan Persembahan iv
Abstrak v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Daftar Gambar xiii
Daftar Tabel xv
Daftar Lampiran xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Manfaat Penelitian 5
1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi 12
2.2.1 Pengertian Sistem 12
2.2.2 Pengertian Informasi 13
2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 14
2.3 Konsep Dasar Pemrograman Web 15
2.3.1 Pengertian Web 15
2.3.2 Arsitektur Web 16
2.3.3 Bahasa Pemrograman Web 17
2.4 Framework Laravel 18
2.4.1 Pengertian Framework 18
2.4.2 Pengertian Laravel 19
2.4.3 Arsitektur Laravel 20
2.5 Basis Data 21
2.5.1 Pengertian Basis Data 21
2.5.2 Pengertian MySQL 22
2.6 Konsep Dasar Perancangan Sistem 23
2.6.1 Pengertian Perancangan Sistem 23
2.6.2 Unified Modeling Language (UML) 24
2.6.3 Use Case Diagram 25
2.6.4 Activity Diagram 26
2.6.5 Sequence Diagram 27
2.6.6 Class Diagram 28
2.6.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 29
2.7 Pengujian Sistem 30
2.7.1 Pengertian Pengujian Sistem 30
2.7.2 Black Box Testing 31
2.7.3 White Box Testing 32
2.8 Metode Pengembangan Sistem 33
2.8.1 Pengertian Metode Pengembangan Sistem 33
2.8.2 Metode Waterfall 34
2.9 Kerangka Berpikir 36
2.10 Hipotesis 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38
3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3 Populasi dan Sampel 39
3.4 Variabel Penelitian 40
3.5 Definisi Operasional Variabel 41
3.6 Teknik Pengumpulan Data 42
3.7 Instrumen Penelitian 43
3.8 Metode Pengembangan Sistem 44
3.9 Analisis Kebutuhan Sistem 45
3.10 Perancangan Sistem 46
3.11 Implementasi Sistem 47
3.12 Pengujian Sistem 48
3.13 Pemeliharaan Sistem 49

3.3 Pengolahan Kuisioner Analisis Data 47
3.4 Analisis Data 48
BAB IV Lokasi Tabulasi Penelitian dan Hasil 50
4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 50
4.2 Hasil Uji Regresi Berganda 58
BAB V Kesimpulan dan Saran 111
5.1 Kesimpulan 111
5.2 Saran 112
BAB VI Hasil dan Pembahasan 114
6.1 Menyusun Agenda 114
6.2 Merancang Program 116
BAB VII Pembahasan Hasil Uji 118
7.1 Pengumpulan Data 118
7.2 Pengolahan Data 119
7.3 Analisis Data 120
BAB VIII Rencana Laporan Akhir dan Evaluasi Hasil dan Proses Kegiatan 122
8.1 Laporan Akhir 122
8.2 Evaluasi Proses Kegiatan 123
8.3 Evaluasi Hasil Kegiatan 124

6.1.1 Interface Pemakaian Perangkat Keras(Hal) 144
Biometrik
6.2.1 Pelaksanaan Rancang Bangun Jaringan (internet) 152
Biometrik yang Lebih Aman
6.3 Tentang Tanggung Jawab Pelaksanaan 156
Laporan Pembuatan Kerja/Laporan yang
Bertanggungjawab
BAB IX KESIMPULAN
9.1 Kesimpulan Aplikasi Pengawasan Biometrik 156
Pelaksanaan Laporan Sistem Implementasi
Kepuasan Pelaku
9.2 Saran 160

DAFTAR PUSTAKA

INDEX

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

Bagian 1 A ... Model Implementasi Institusional [hal]
Bagian 1 B ... Regulasi dan Sistem Pelayanan [hal]
Bagian 1 C ... Lampiran Kerja Pelayanan [hal]
Bagian 1 D ... Kebijakan Pelaporan / Model Implementasi Kelembagaan Pemerintah
Bagian A 1 ... Kompetensi Kompetensi Analisis Data Mutasi Internasional
Bagian A 2 ... Data Base [hal]
Bagian A 3 ... Grafik Untuk Internet Pemerintah Dan Pejabat Kantor
Bagian B ... Grafik Tata Letak Laboratorium dan Bentuk [hal]
Bagian B 1 ... Di Kembangkan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten/Kantor
Bagian A 2 ... Prinsip Pelaksanaan Kerja Pemerintah Oleh Negeri PP dan Politik
Bagian C 1 ... Faktor Faktor Yang Berhubungan Mempengaruhi Staf Pemerintah Laboratorium Medis
Bagian C 2 ... Kebijakan Pelayanan Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Pelaksanaan Pemerintah Daerah Jaringan
Bagian A 3 ... Jalur Koordinasi dan Alur Pemerintah Dan Kementerian di Lembaganya Negara
Bagian A 4 ... Interaksi Masyarakat Sekitar dengan Lokalisasi Negara
Bagian 3 a ... Di Kota PMA tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemerintah
Bagian A 1 ... Lokalisasi Uji di Kabupaten/Kantor
Bagian A 2 ... Kesimpulan Data Kegiatan Berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Alur Mekanisme Melalui Perilaku Kerja Pemerintah
Bagian A 3 ... Tenaga Kesehatan Tanggi Lintas Unit Pusat Bersama
Bagian A 4 ... Lalu lintas Data Kelompok Pembangunan, Pelaksanaan Hubungannya Dari Implementasi Kebijakan
Bagian A 5 ... Kualitas Politik Hubungannya dengan Masyarakat

Spis treści

Rozdział 1 ... 1
Rozdział 2 ... 15
Rozdział 3 ... 32
Rozdział 4 ... 47
Rozdział 5 ... 63
Rozdział 6 ... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ... Model Model Kebijakan Pemilihan ... (6)
Tabel 4.1 ... Potensi Ekonomi Desa Pagu Kulon ... (65)
Tabel 5.1 ... Rencana Program Desa dan Biaya ... (107)
Tabel 6.1 ... Program Aksi dan Model Dalam Pengembangan Jangka Model Berkelanjutan Berbasis Partisi ... (126)

GLOSARIUM

Antropometri
(n) Ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia.

Antropometri Statis
(n) Antropometri yang dilakukan dengan posisi tubuh tetap.

Antropometri Dinamis
(n) Antropometri yang dilakukan dengan posisi tubuh bergerak.

Anthropometry
(n) The science that deals with the measurement of the human body.

Static Anthropometry
(n) Anthropometry carried out with the body in a fixed position.

Dynamic Anthropometry
(n) Anthropometry carried out with the body in motion.

ABSTRACT

[redacted]

Keywords: [redacted]

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunung Kelimutan merupakan salah satu gunung api yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki tiga buah danau kawah yang berbeda warna, yaitu Tiwu Ata Mbupu, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, dan Tiwu Ata Polo. Perubahan warna danau ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan peneliti. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, kandungan mineral, serta interaksi antara air danau dengan gas yang keluar dari dasar kawah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek geologi dan geokimia Gunung Kelimutan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum banyak yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memodelkan perubahan warna danau. Padahal, pemodelan matematis dapat membantu memprediksi kecenderungan perubahan warna berdasarkan variabel-variabel tertentu, seperti suhu, pH, dan konsentrasi ion logam.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model matematis sederhana yang dapat menggambarkan hubungan antara beberapa variabel tersebut dengan warna danau. Model ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pengelola kawasan dan peneliti dalam memantau kondisi danau secara lebih efisien.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi menarik ini pertamakali lahir pada tahun 1970-an yang lalu oleh Harold Lasswell (1956) mengembangkan pendekatan ilmu pengetahuan kebijakan publik dapat digunakan untuk pemecahan dengan apa yang ia sebut sebagai pendekatan proses dalam kebijakan. Menurutnya implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan publik, sebab pembuatan apapun kebijakan, kesuksesan tergantung dari evaluasi. Meskipun Lasswell telah secara khusus membuat pendekatan terhadap apa penting implementasi kebijakan dari kesuksesan tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan kebijakan, namun tidak ada ia berhasil mengembangkan kerangka konseptual yang mantap. Konsep yang sudah dikenal dalam Ilmu Politik dan Kebijakan Publik. Maka saat ini konsep implementasi kemudian banyak dipakai untuk menjelaskan berbagai kesenjangan kebijakan publik. Meskipun konsep ini sudah sering digunakan oleh para ahli, misalnya Nakamur (1975), adalah Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (1979) yang dianggap sebagai pionir studi implementasi. Hal ini karena buku yang pertama kali yang

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] "Dengan demikian [illegible] yang harus dimiliki adalah [illegible] yang lentur, [illegible] yang [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] [illegible].

2.3. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

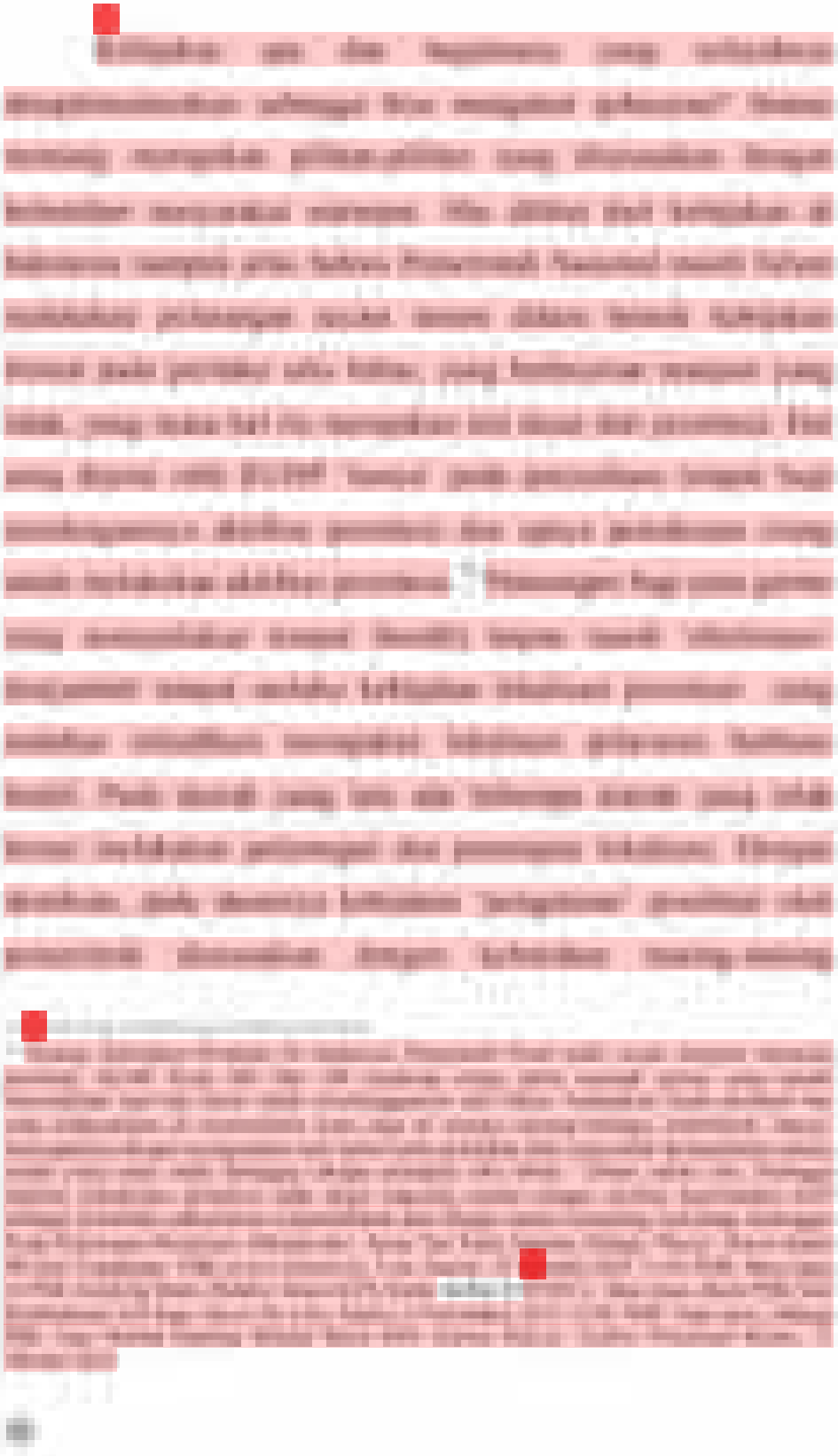

Tabel 2.1 | Model-Model Kebijakan Prostitusi

Model	Aktivitas	Kriminalisasi Kebijakan	Kriminalisasi Kegiatan
Kriminalisasi	Prostitusi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi
Abolisi	Tidak ada kriminalisasi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi
Abolisi Kriminalisasi	Tidak ada kriminalisasi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi	Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi Kriminalisasi

Kriminalisasi kebijakan yang 'reformasi' terhadap prostitusi (dan juga kriminalisasi dengan yang ada di Indonesia terhadap kegiatan di Indonesia dikenal dalam kebijakan 'reformasi' (Penanggulangan IDU HIV/AIDS dengan pendekatan Komisi Penanggulangan IDU / AIDS yang bekerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat. Para aktivis dikriminalisasi kebijakan jaksa maupun kriminalisasi ini dapat kita lihat. Di sini kita kebijakan kriminalisasi, meskipun dan memberi kebijakan prostitusi di Kriminalisasi yang dengan kebijakan publik yang kebijakan menangkal penyebaran narkoba dan mengendalikan

[illegible]

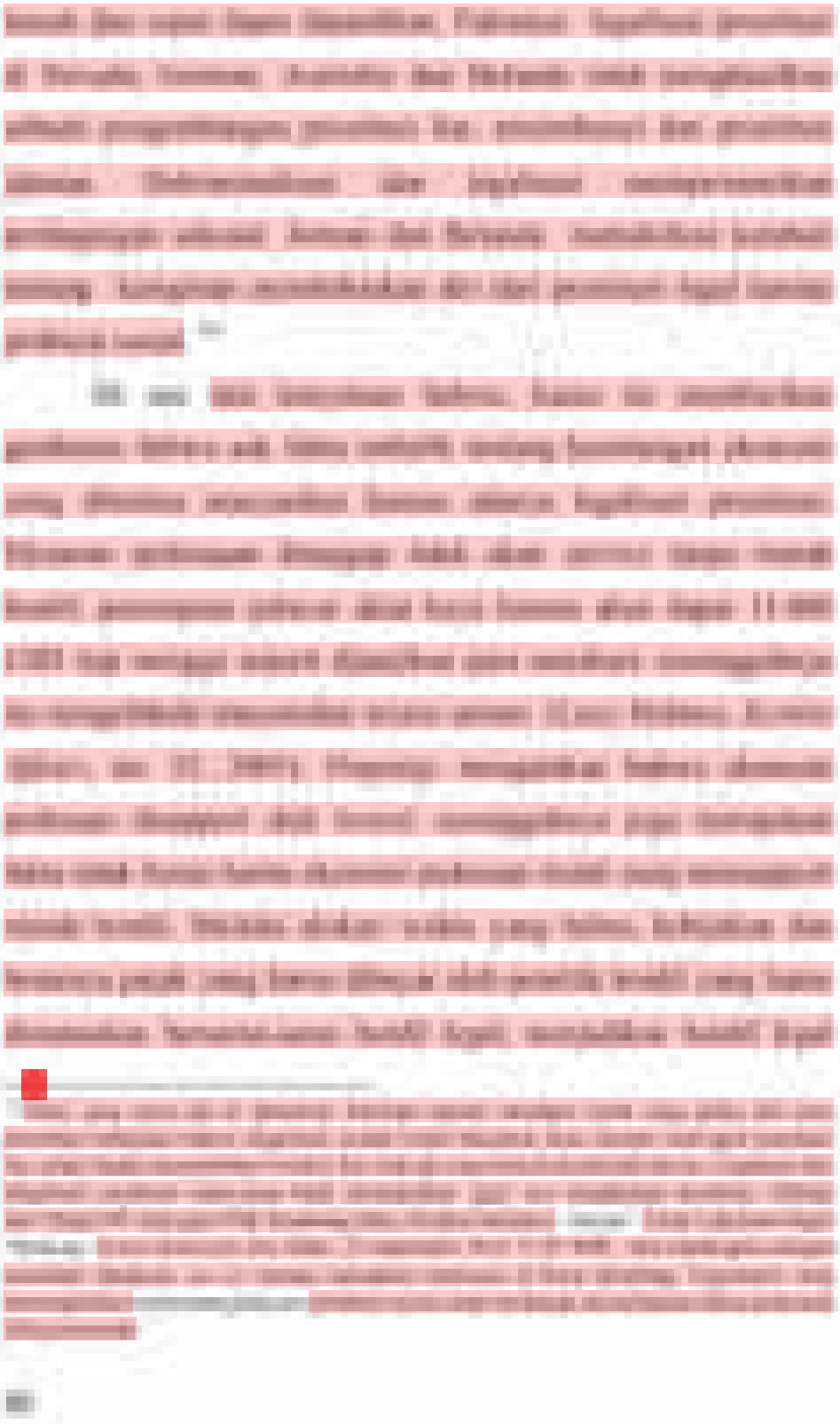

[illegible]

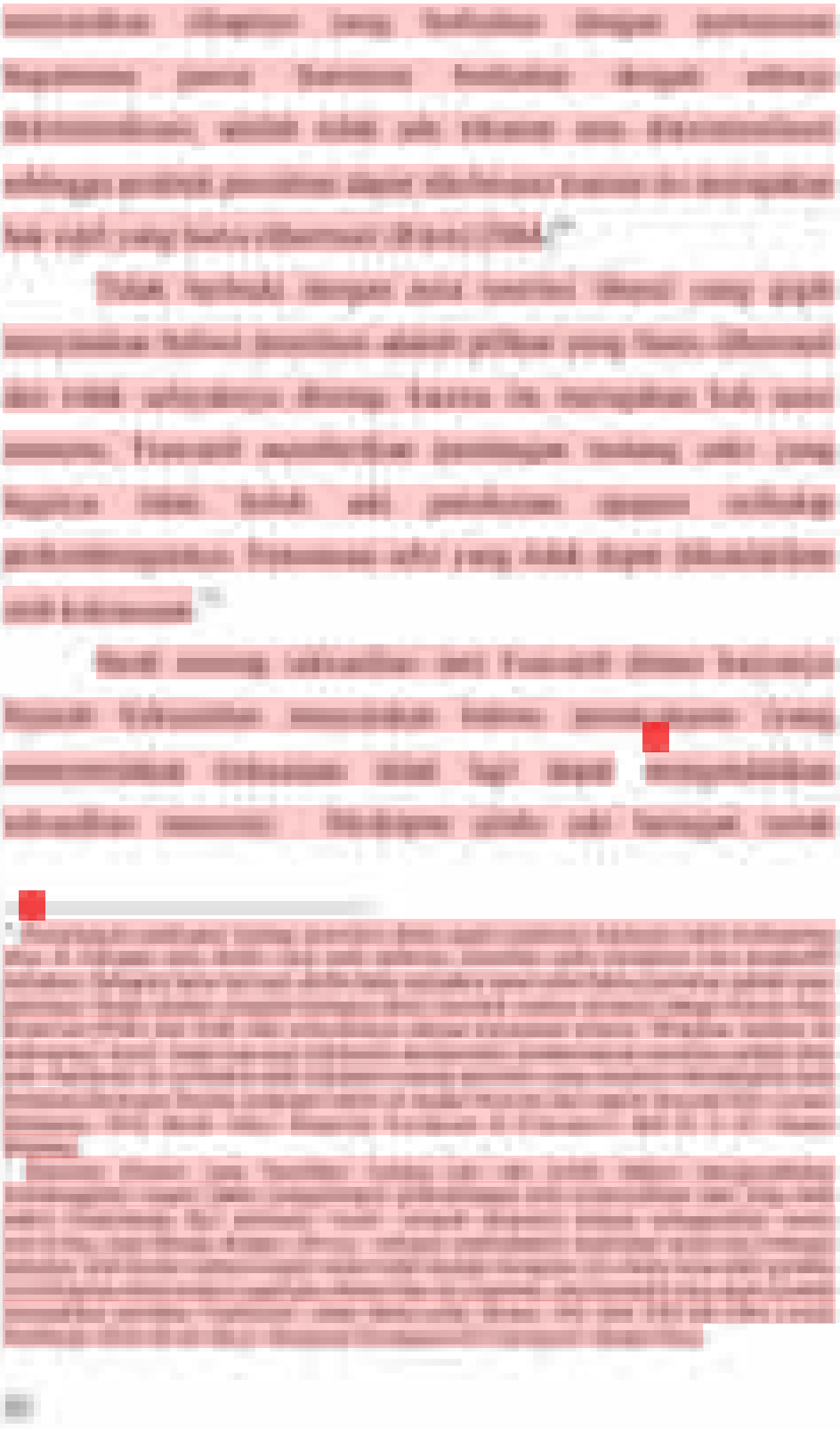

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

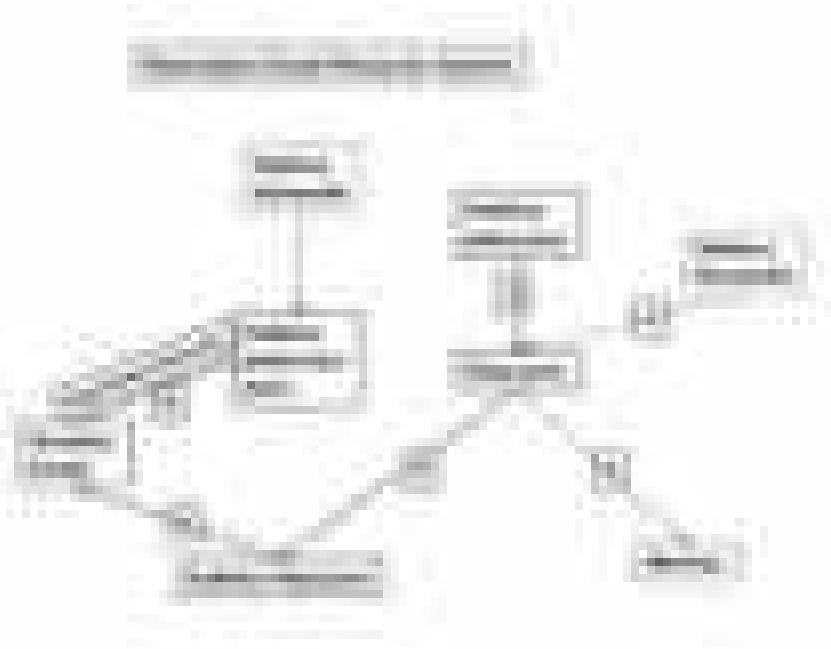

[illegible]

Gambar 2.2

[illegible]

Pasal ini telah [illegible] [illegible] yang dipunyai suami bersama harta [illegible] dan di dalam [illegible] [illegible] [illegible]

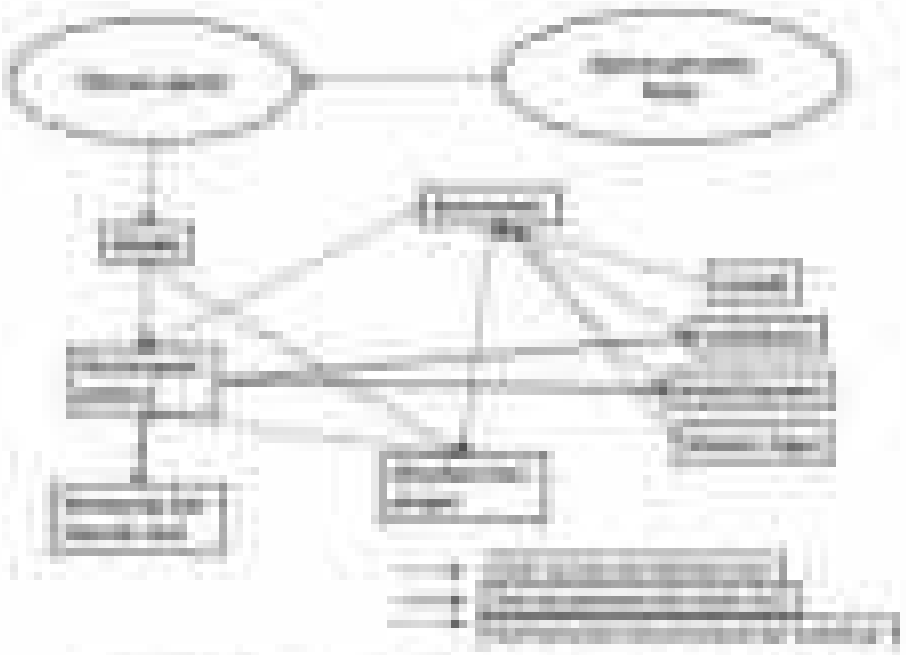

[redacted]

[illegible]

[redacted]

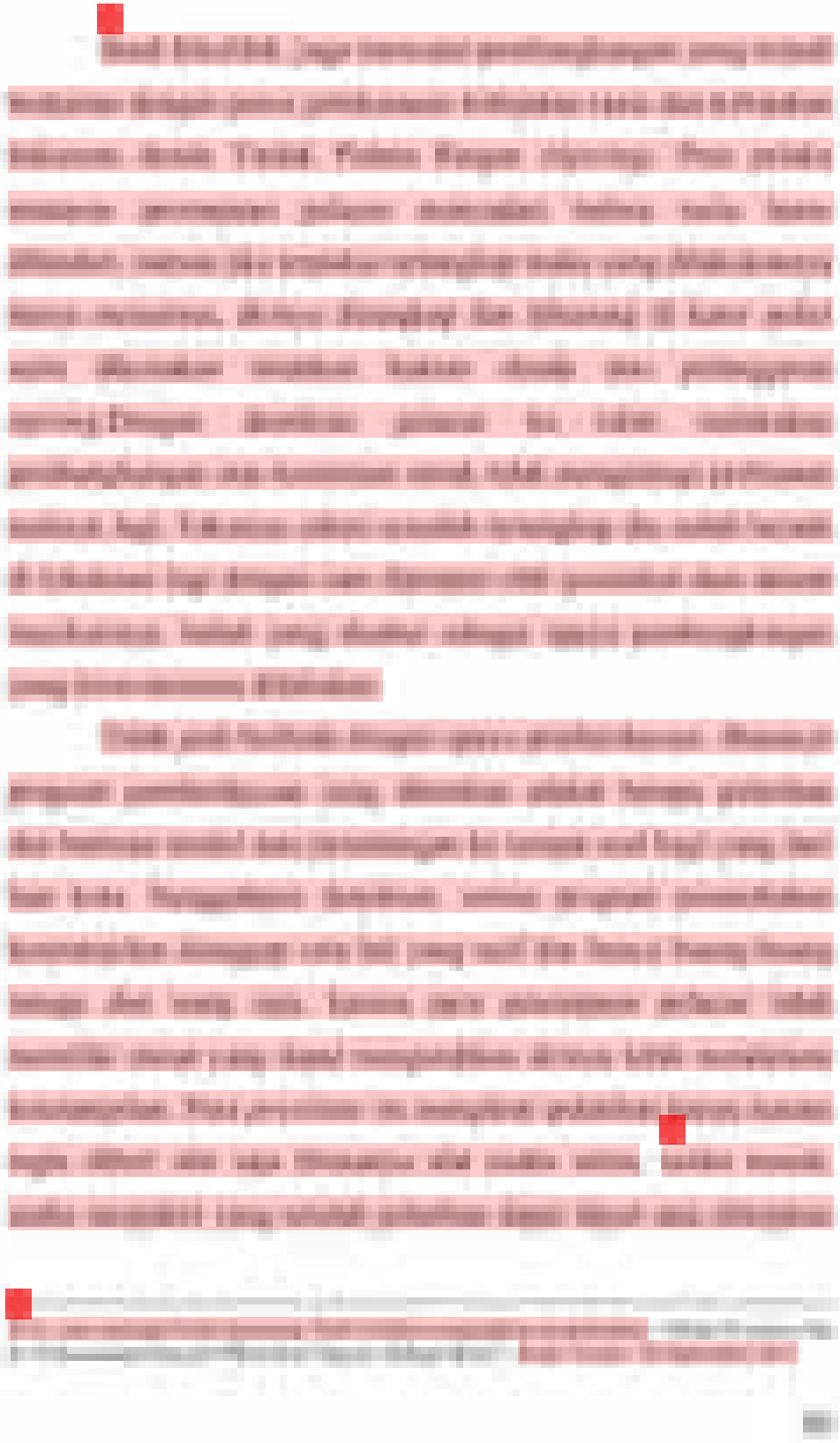

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

[illegible]

[redacted]

2.1. [redacted]

[redacted]

[illegible]

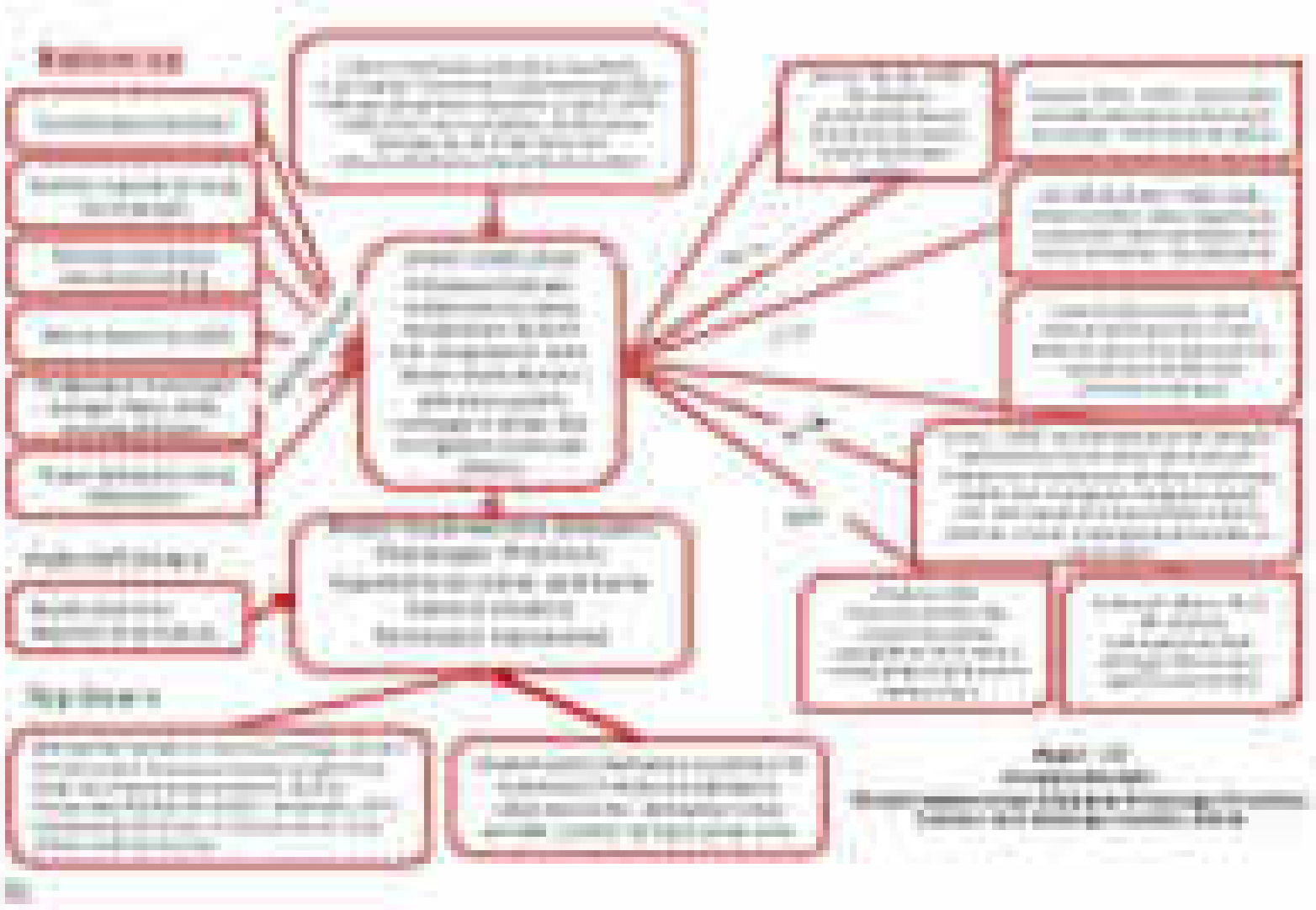

BAB III
METODOLOGI

3.1. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan bagian penelitian yang menyangkut urutan proses dan aktivitas. Rancangan penelitian secara terintegrasi dengan pendekatannya dimaksud untuk memberi gambaran yang lengkap yang akan dilakukan. Nugroho (2007) menyebutkan bahwa penelitian ilmiah pendidikan kesehatan lebih diidentikkan pada ranah kesehatan, sehingga ilmu kesehatan masyarakat yang akan digunakan. Notoatmodjo (2010) menyebutkan bahwa dengan menggunakan dalam penelitian dapat dilakukan pendekatan dalam bidang ilmu kesehatan yang termasuk dalam upaya tahapan dalam penelitian dan menggunakan pendekatan yang digunakan.

Tahap dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan penelitian pada responden dan kelompok yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Tahap penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Tahap persiapan meliputi pembuatan proposal, seminar proposal, revisi proposal, pengurusan perizinan, mempersiapkan instrumen penelitian, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, mempersiapkan responden penelitian. Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data. Tahap akhir meliputi penyusunan laporan hasil penelitian, seminar hasil penelitian, revisi laporan penelitian, dan penggandaan laporan penelitian.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

5.6. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5.8. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Gambar 2.1 Komponen Kebijakan Publik (Dunn)
Sumber: Kumpulan kuliah kebijakan publik (ppt), Dosen mata kuliah Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Jember (2017)

Kesimpulan dari pendapat-pendapat ahli di atas adalah kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud tertentu untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau bentuk lainnya yang mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik juga dapat berupa program atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A.1. [illegible]

[illegible] "Rawat" yang telah [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Kultur (berjarak 0,1 km) menggunakan pemanfaatan pemukiman di sekitar aliran kali kecamatan. Banyak penduduk juga untuk lebih baik yang kebanyakan mulai dari masak makanan.Banyak sehingga di gunakan pasti saja untuk lebih baik karena mereka kebanyakan memiliki pekerjaan sampingan cara suatu kalian kecil kepada ikan, dan ceri, lewat, dan, pemandangan dan.Kegunaan makanan penghasilan pendapatan Pagar Kalian adalah menggunakan kegunaan sekitar untuk kondisi ini.

Tabel 4.1 Potensi Ekonomi Desa Pagar Kalian

Potensi pendukung	Jumlah penduduk	Jumlah dan persentase	Jumlah orang
Laki-laki		1.113 ha	
Perempuan		962 ha	
Usia 15 tahun keatas		1.075 ha	
Mata pencaharian utama sebagai petani			1.762
Mata pencaharian sebagai nelayan/ penangkap			340
Mata pencaharian sebagai pedagang			87
Mata pencaharian sebagai PNS/pensiun			65
Mata pencaharian sebagai Angkutan			14
Mata pencaharian selain sebutkan lain-lain			84
Mata pencaharian sebagai sebutkan lain-lain			50
Pendidikan tamatan SD	1.200 orang		
Pendidikan tamatan SMP	980 orang		
Pendidikan tamatan SMA	750 orang		
Pendidikan tamatan	650 orang		
Pendidikan tamatan	1.200 ha		
Pendidikan tamatan	1.200 ha		
Sarana prasarana kesehatan	1.113 ha		

Sumber: Kantor Kepala Desa Pagar Kalian tahun 2021

[illegible]

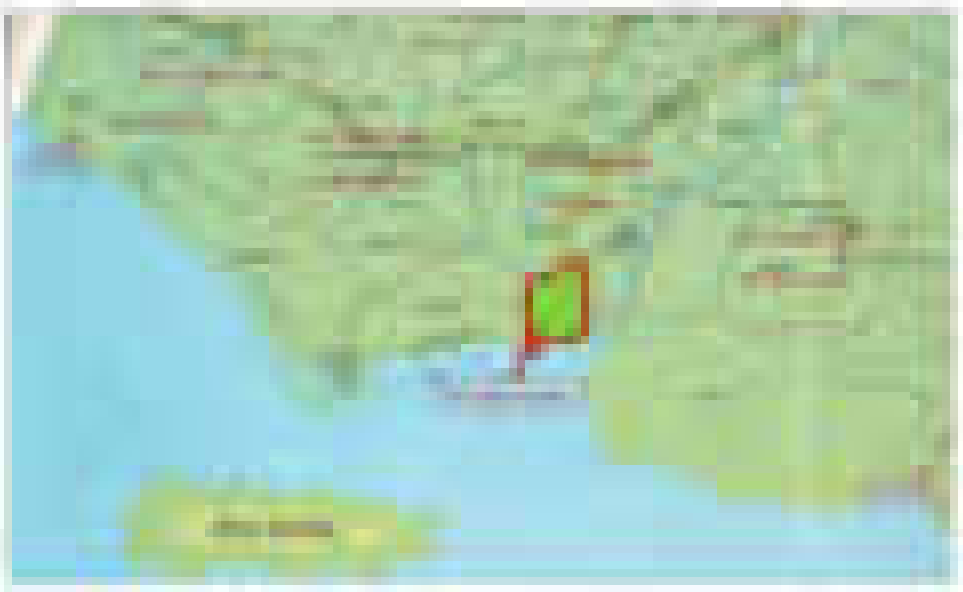

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

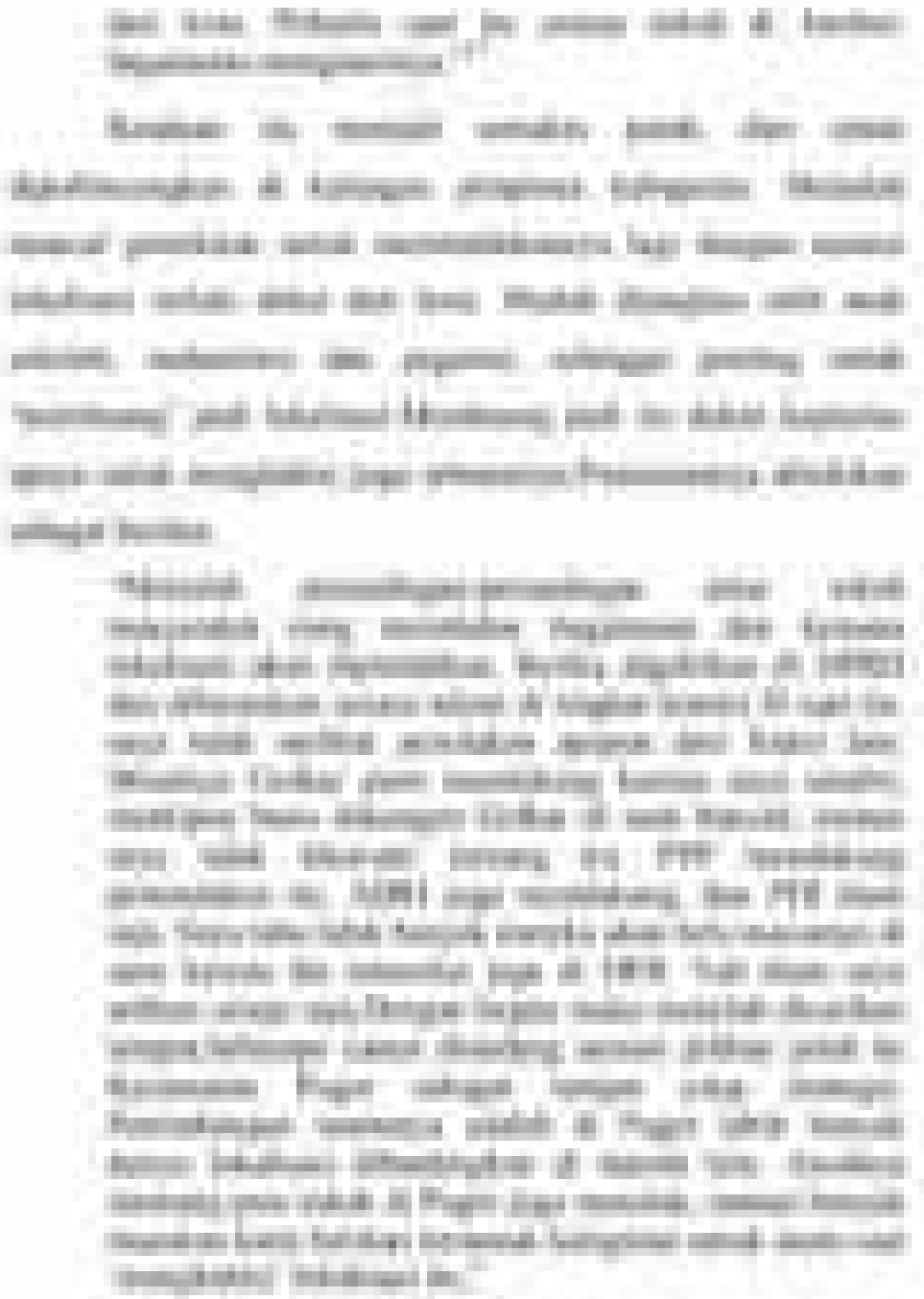

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

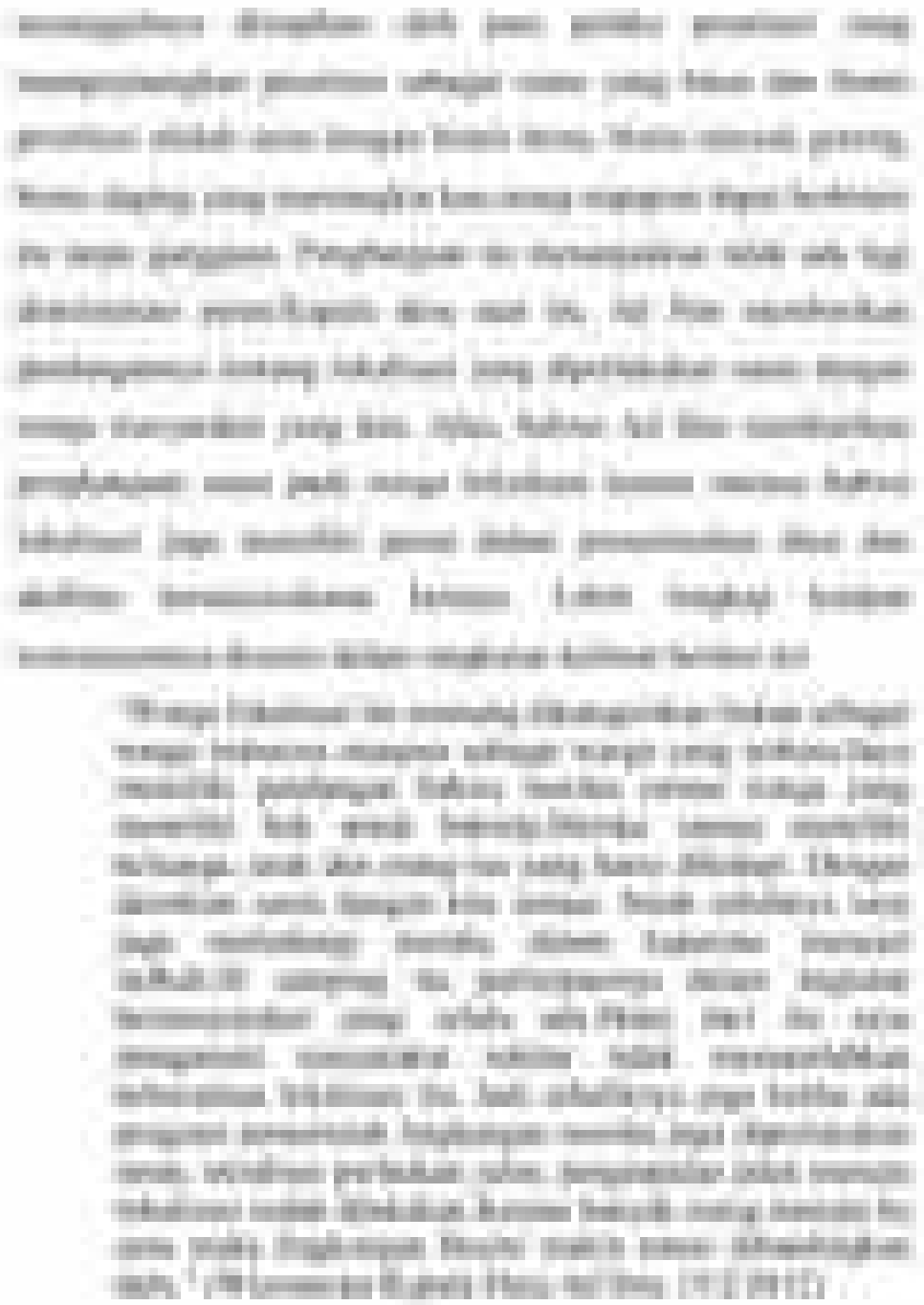

[illegible]

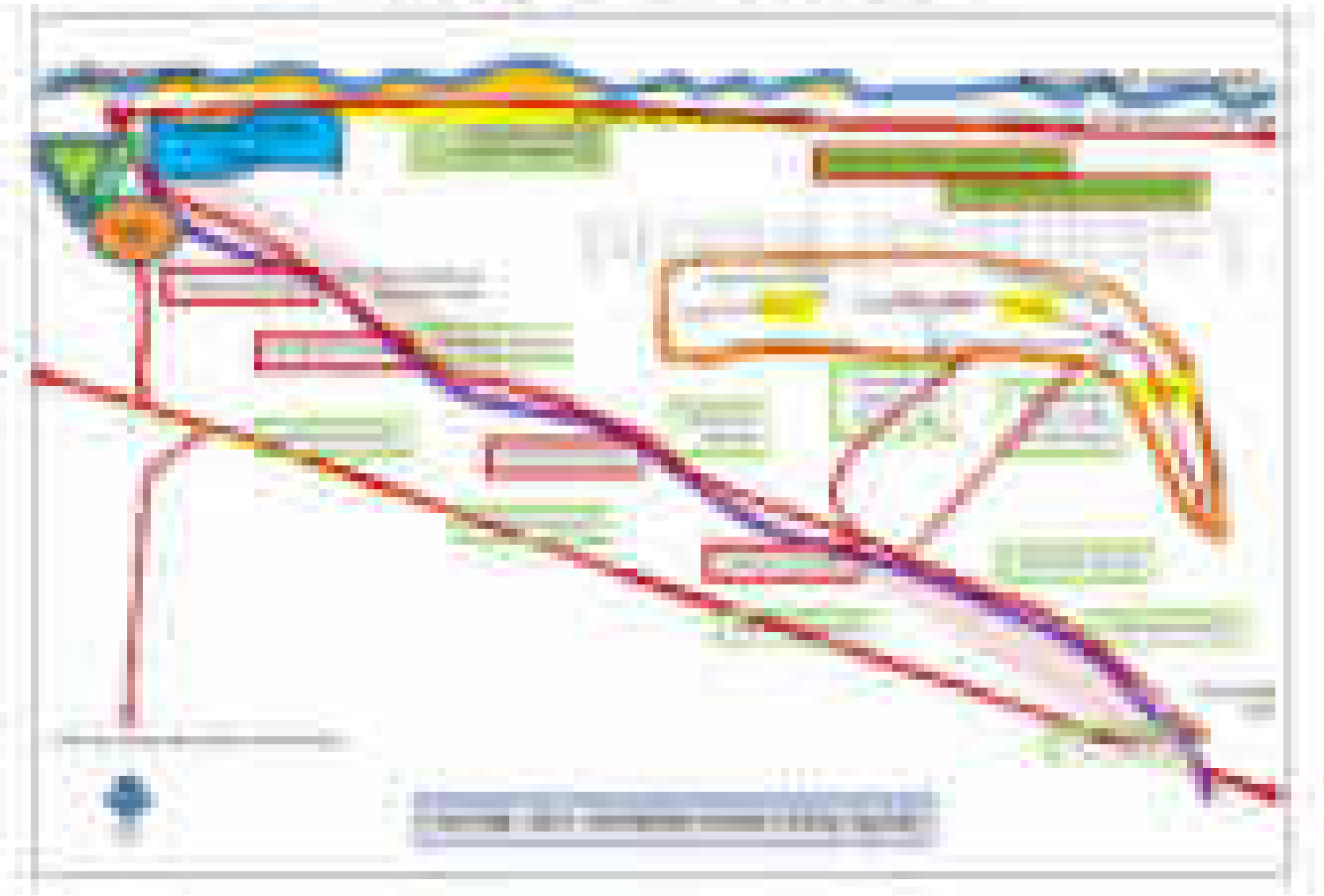

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pasal 9

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

[illegible]

Bagan 1.1 : Pembentukan Kabupaten Provinsi di Kabupaten Jember

[illegible]

[illegible]

[illegible] dengan kredit/pasti dan proporsional. Secara lengkap SK A-B4 tersebut dapat diperiksa di bawah kesimarian Pilgan pada tanggal 13 [illegible] yang berlaku dimana sistem kegiatan pemilu legislatif pelaksana Pemilu. Segenap pemilihannya tentang keberadaan kebutuhan Mutan yang memiliki saja, ada dan kegiatannya termasuk dia terhadap para pelaksana dan yang mendukung kesiapannya:

> "Untuk membahas secara lebih lengkap apa, dimana dan bagaimana pengaplikasian. Kami lakukan ini bukannya apa-apa hanya dari masyarakat. Masyarakat yang mempercayai kami dapat memberikan kesempatan tinggi dan pertanyaan. Namun di kami [illegible] pertanyaan. Kami [illegible] kami [illegible] [illegible] [illegible]

Bagan 1.2. Prosedur Pelaksanaan Rawat Penetapan
Pihak Ketiga di RS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

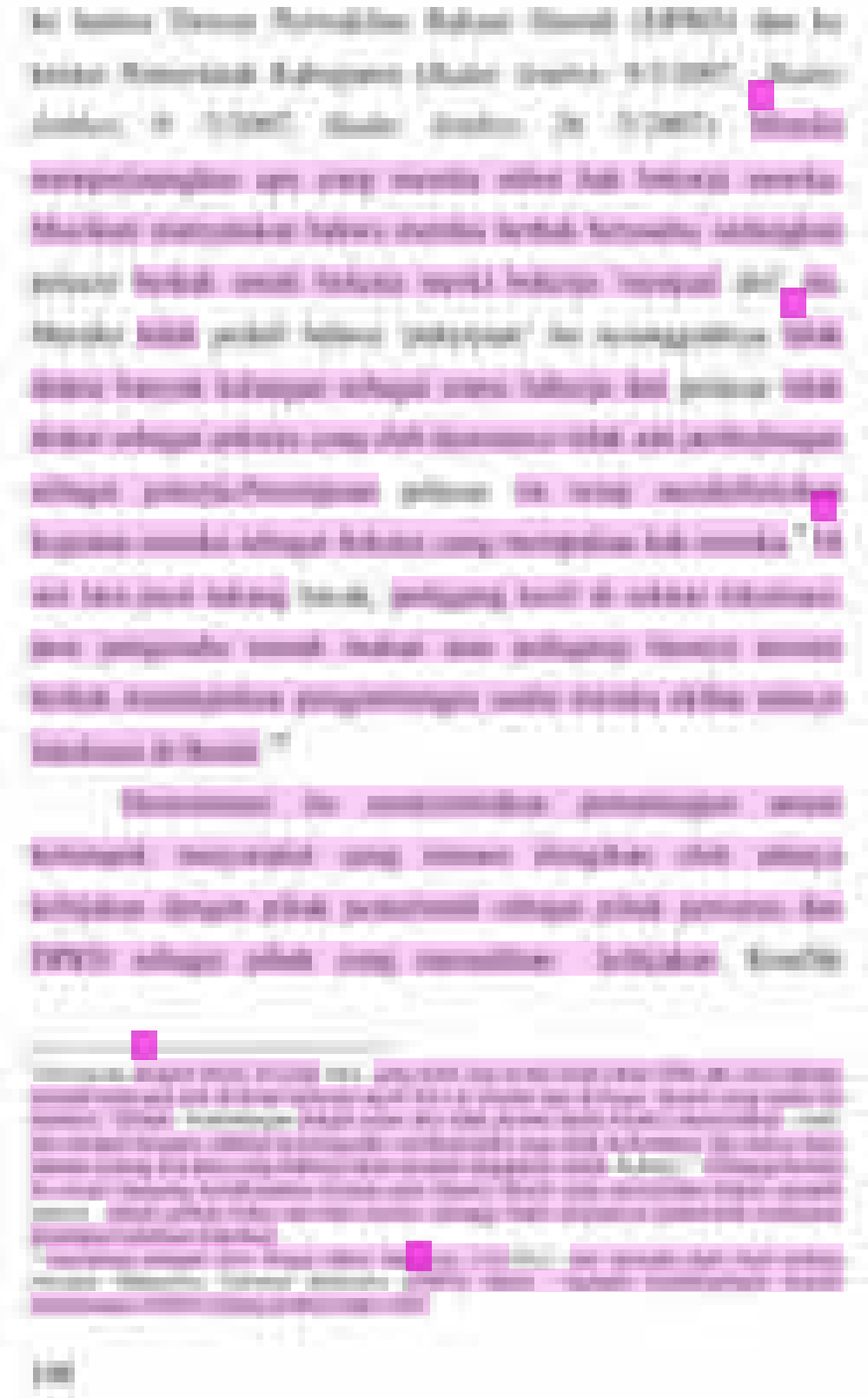

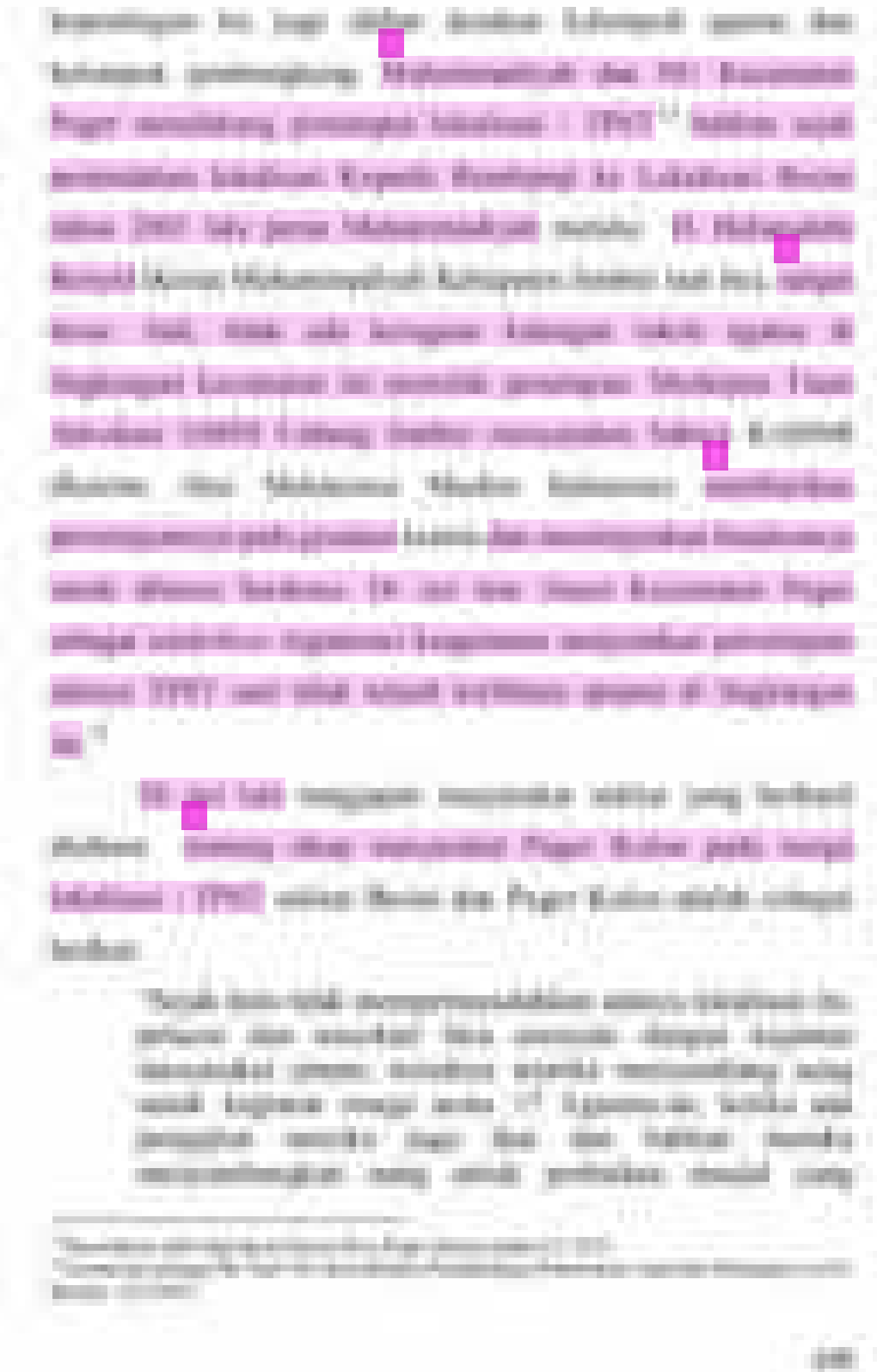

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

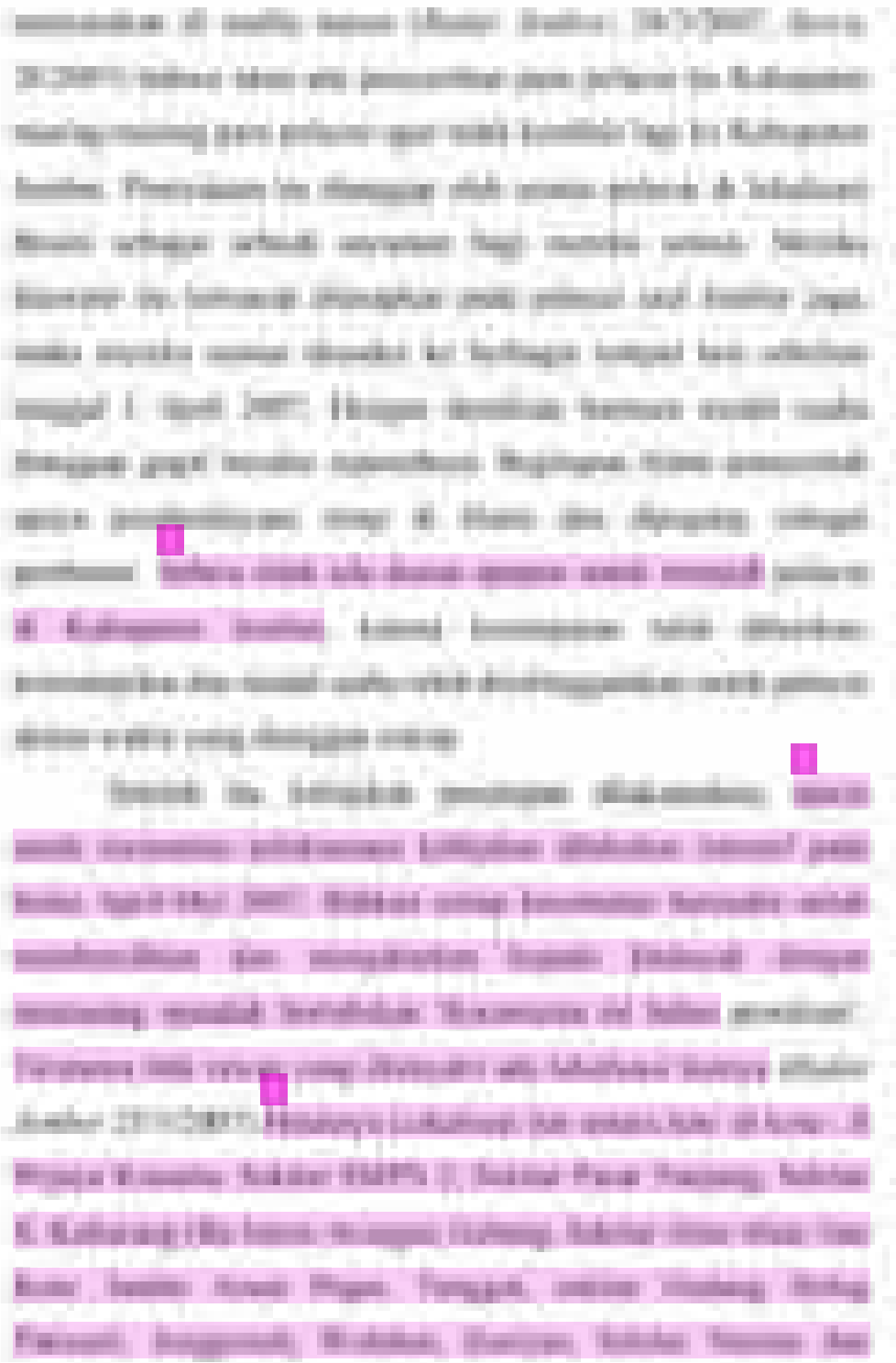

[illegible]

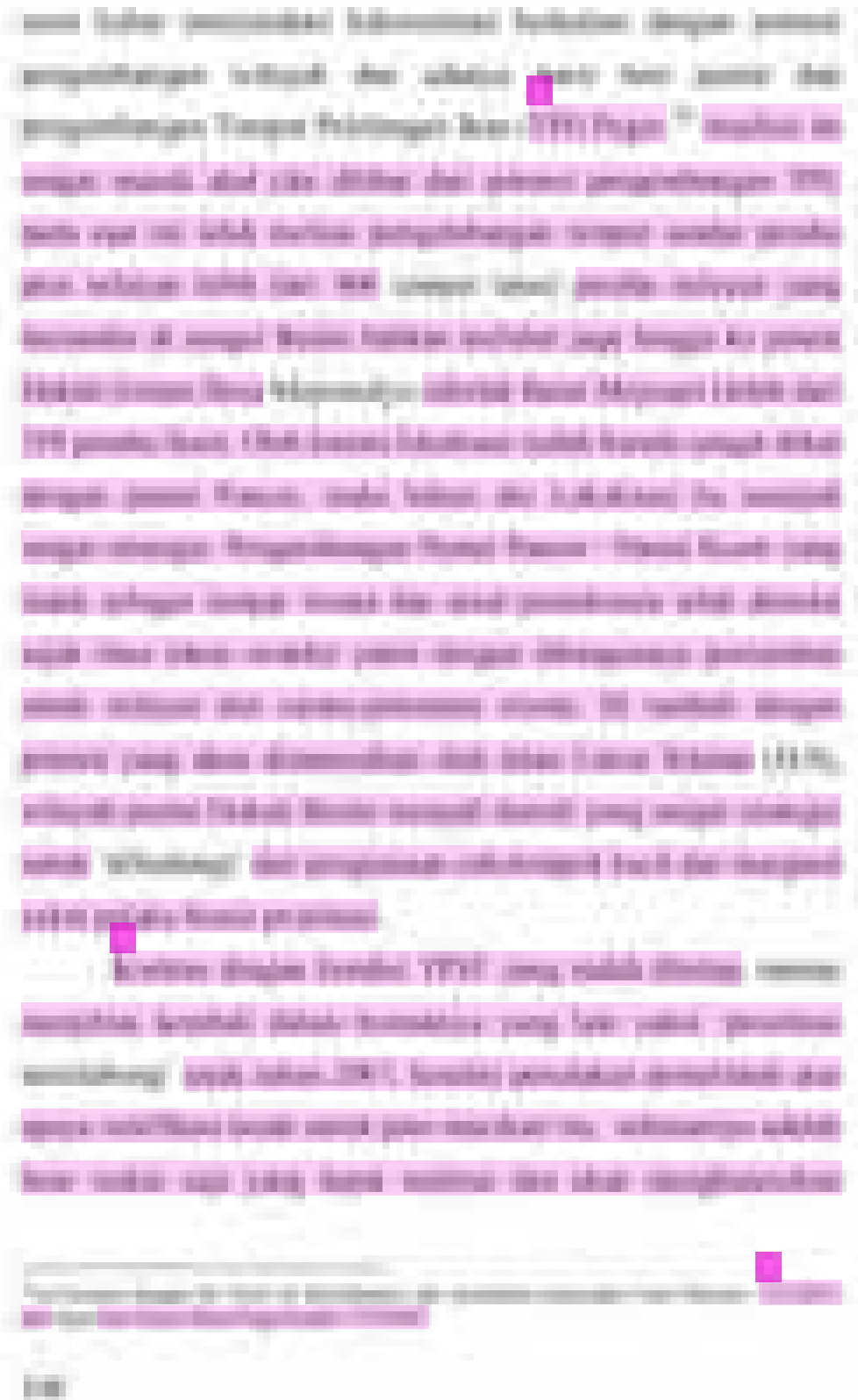

1.4. Pokok-pokok Skenario Penyampaian

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bagan 7.1. menggambarkan provinsi Sumatera yang mewarisi provinsi di sini ini sebagian pula ini harus provinsi Sumatera yang mendukung pribadi pemimpin jika memiliki untuk melakukan 'pelayanan' sebagai pelaku. Sebagian pimpinan provinsi kompleksi tanpa-melanggar hingga pada provinsi yang melarang pemilihan dengan ini sama melakukan pimpinan, pada akhirnya pelayanan dan melakukan pemimpin pada (sesuai-sesuai) level. Pandangan fungsional dan provinsi sampai pria dalam sebagian pimpinan provinsi ini kualitas

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Bencu menceritakan pengalaman tentang [illegible] seseorang ibu dan seorang nenek di sebuah [illegible] Bencu:

> "Saya bertemu [illegible] Ibu, [illegible] dan [illegible] di [illegible] sebuah [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

Contoh tersebut tentang masyarakat di lingkungan pemukiman kita sendiri di kabupaten Bondo dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

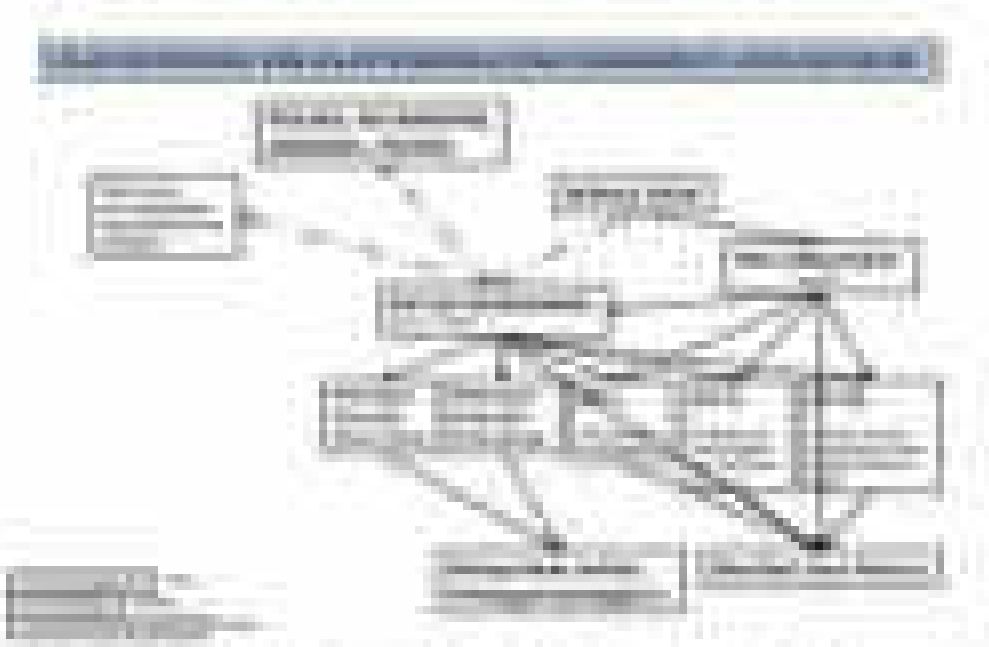

Gambar: Cara Observasi Populasi dengan [illegible]
Bagan 4.1 : Jalur Koordinasi dan Jalur Pengaduan Dinas Kesehatan
di Lokasi [illegible]

[illegible] dan demo, sedapat dan kil yang dicantum yang berkaitan dengan memiliki masyarakat dengan kebidanan yakni memiliki masyarakat secara dengan kebidanan berkaitan dengan akan ekonomi yang berusaha tidak ada kompetensi masyarakat selain secara untuk pada nilai ekonomi kebidanan pemberian kebanyakan memiliki pada nilai pasien' dengan kebidanan, yang dapat kebidanan memiliki media pengertian kesehatan dua yakni kebanyak pengaplikasian dua dan kebanyak pemakai kebidanan dua memiliki kegunaannya. Kebanyakan di memiliki pasien dan di pemberitahuan kesadar?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

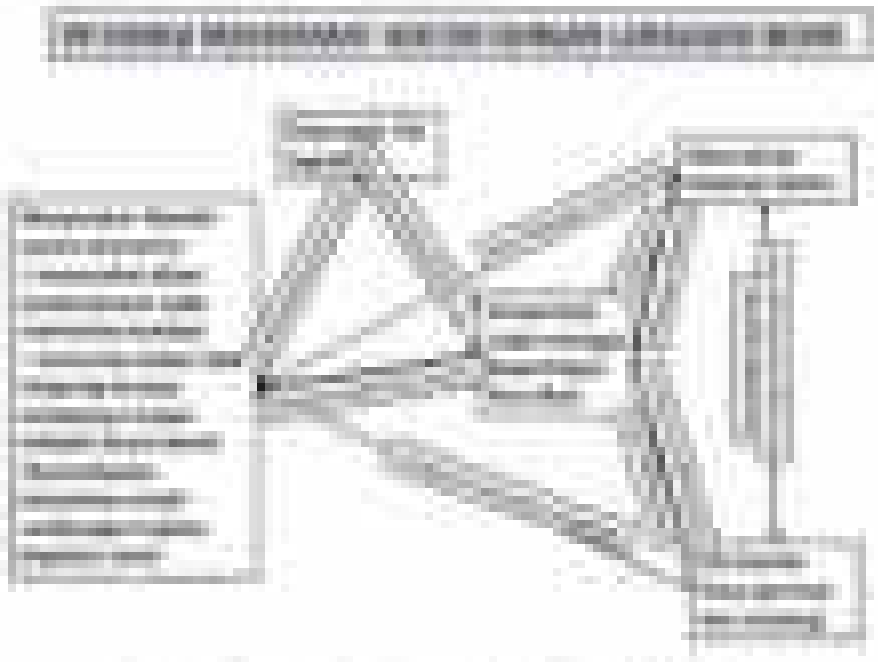

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

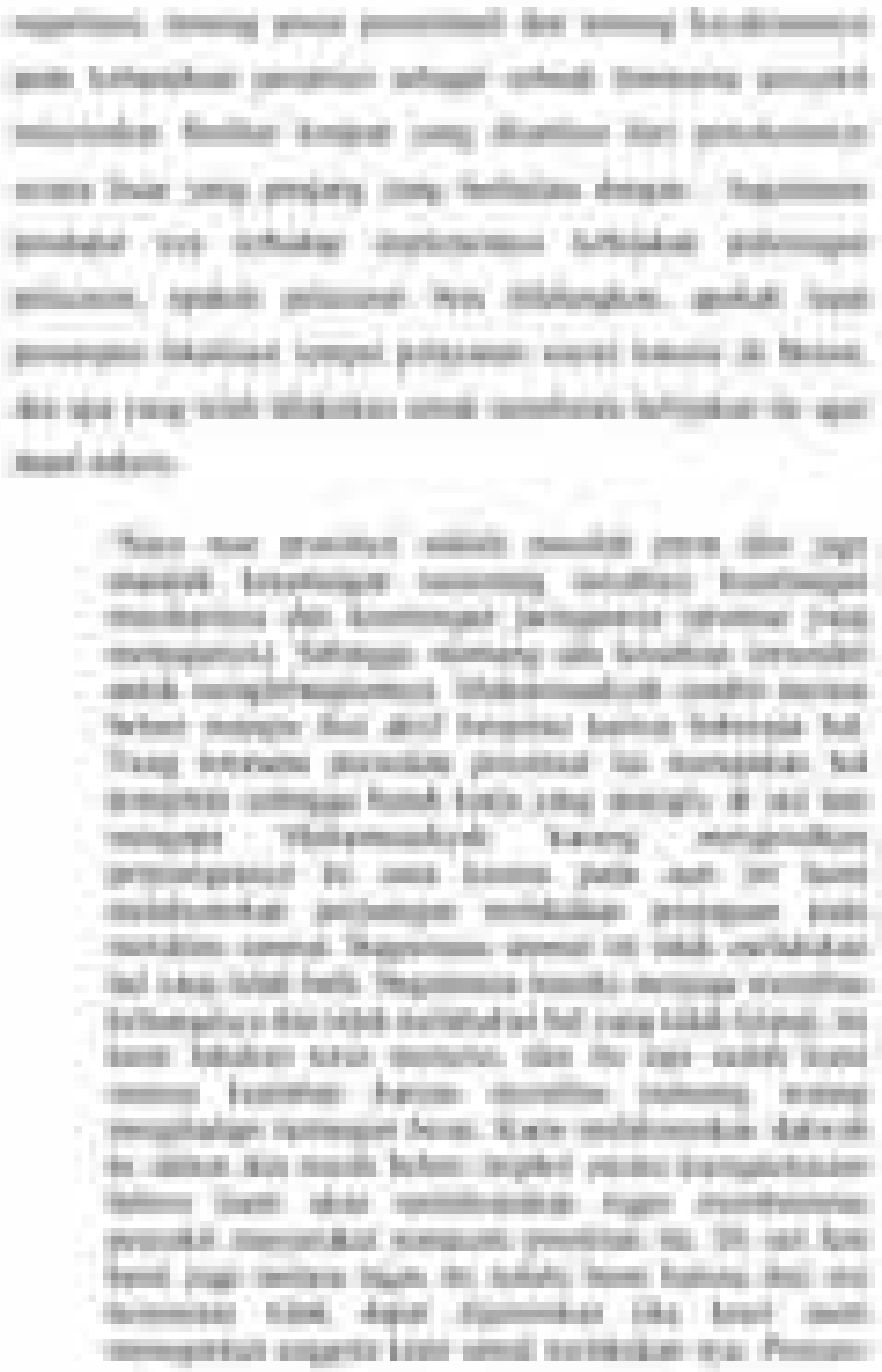

[illegible] (missing text) [illegible]" [illegible] (page 1 [illegible])

[illegible] dari pendapatnya, seseorang [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dengan Kasus "Ir Soe"[1] bagaimana konsep ajaran untuk menghormati pengabdi dan dianggap mandi ghaib[illegible]. Dengan demikian [illegible] [illegible] dan kontinyuitas. Lebih[illegible] [illegible] dikatakan sebagai upaya untuk mempublikasi pemikiran, tetapi bagaimana kedepannya dapat dilihat sebagai upaya untuk [illegible] pemikiran [illegible] yang kompleks yakni [illegible] dengan pemahaman [illegible], masih [illegible], dan pemahaman [illegible]. Sehingga kebutuhan yang dimaksudkan [illegible] tidak [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

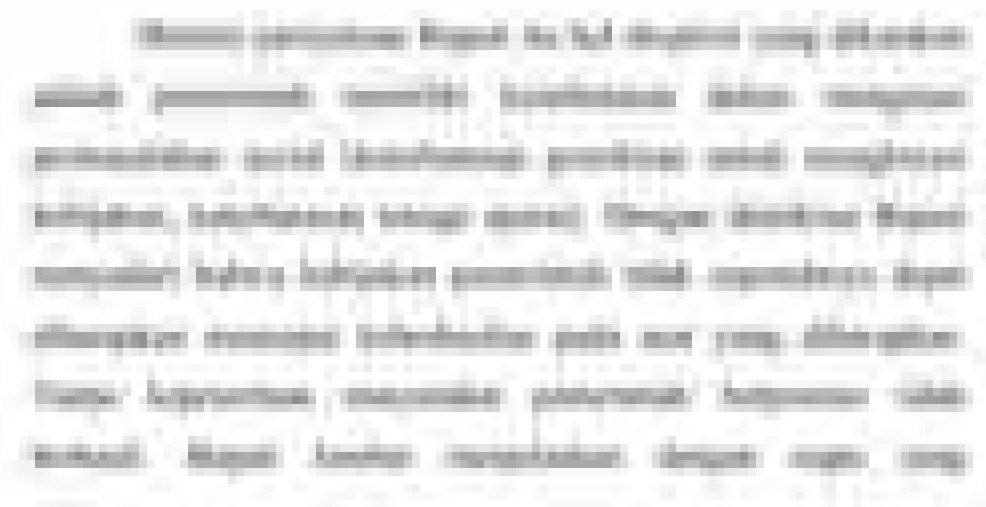

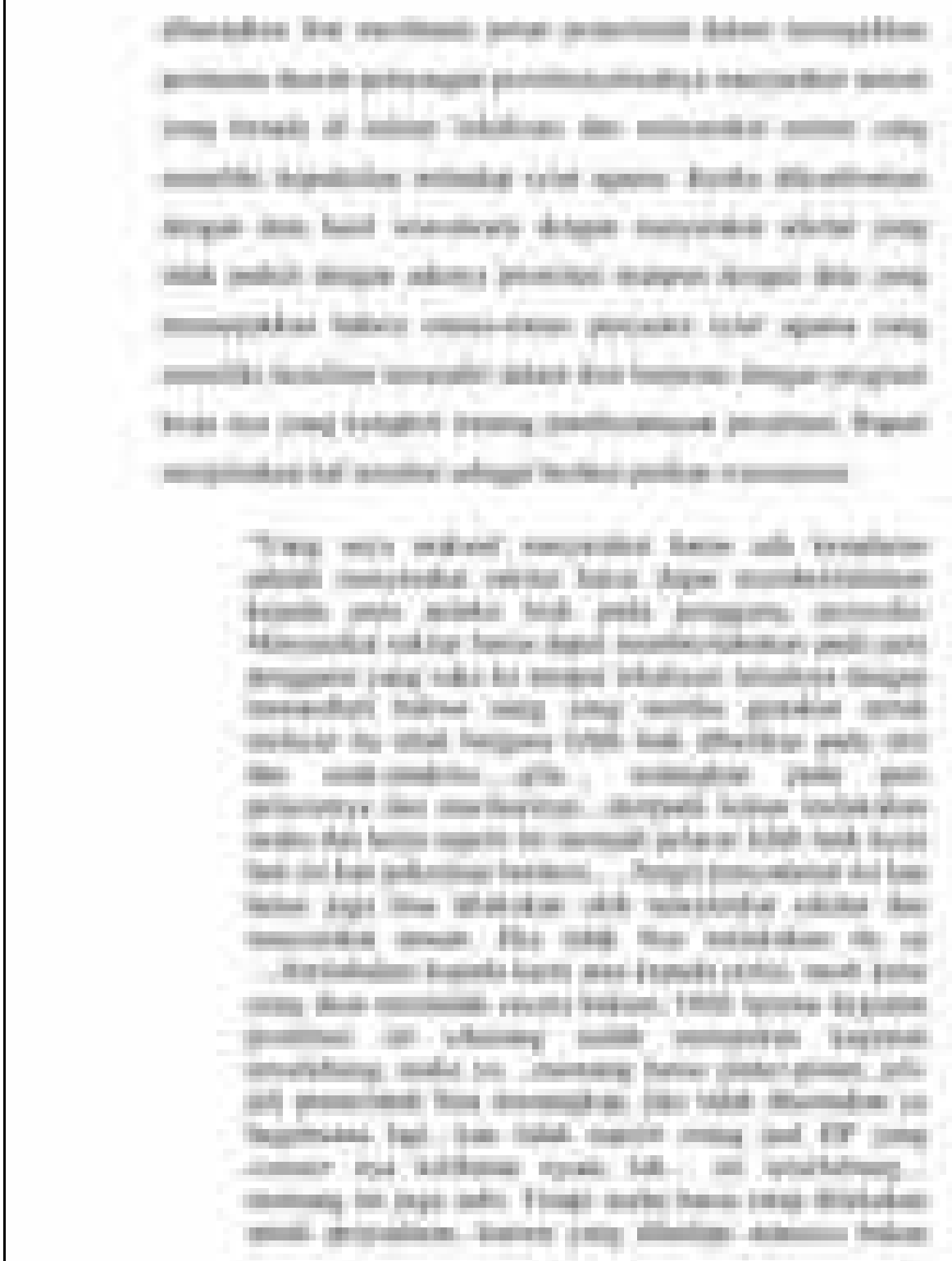

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

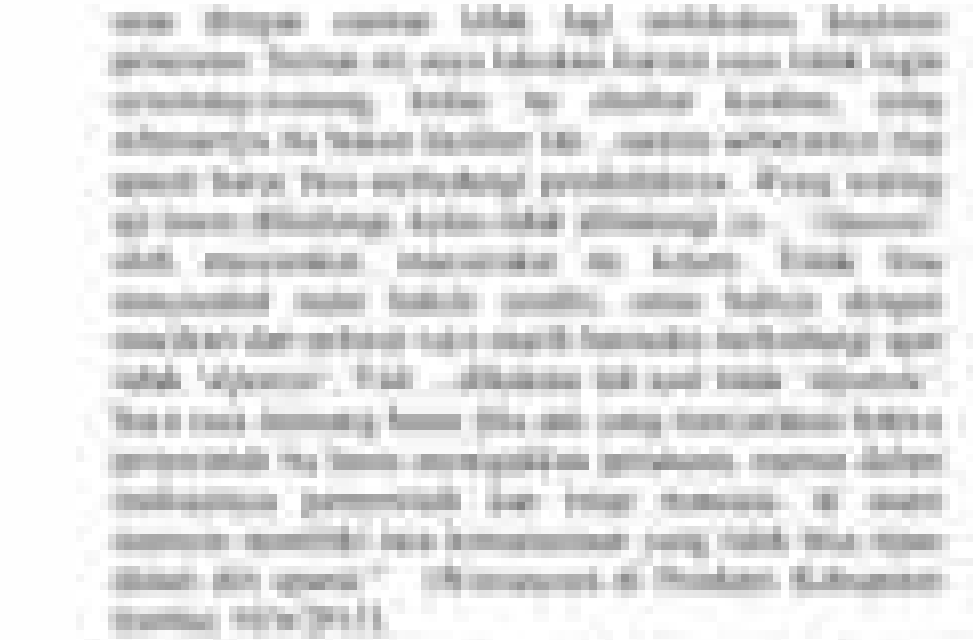

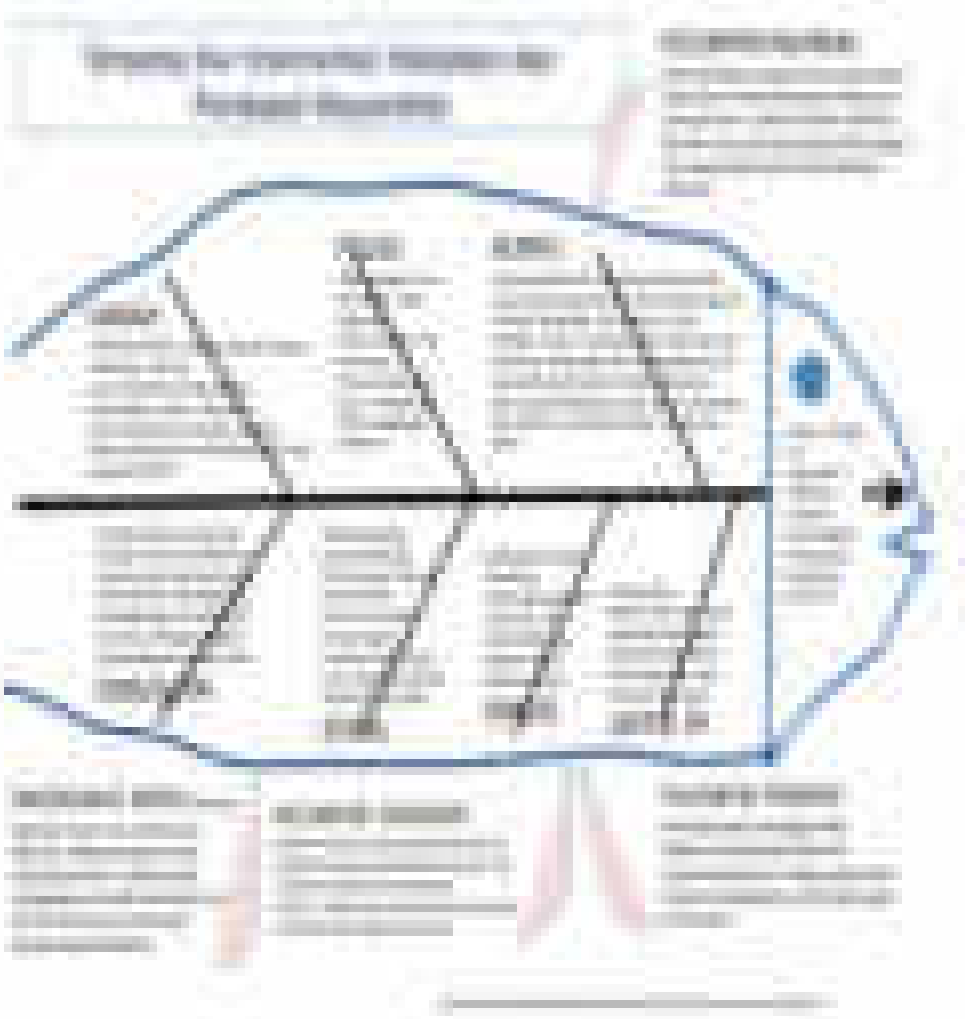

Bagan 1.1. Metode Public Locking Implementasi Kebijakan Pelayanan Prioritas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible] yaitu apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas dan berhubungannya dengan hukum PP dan bagaimana dapat ditemukan dan penulis kutip Vos yang menyebutkannya dalam ensiklopedi yang berbunyi demikian:

> "Pengertian hukum [yang] begitu luasnya [1994] sudah ditinggalkan sekitar 1967. Kebijakan pemerintah untuk sistem hukum di saat ditinggalkan oleh para ahli sarjana sebagai hukum-hukum PP dan untuk kepentingan juga memiliki kedudukan yang sama sekali berbeda-beda kebijakan itu. Para filosofis kami berkesimpulan pemerintah pada para pelaksana yang bertanggung jawab yang sudah di kenal yaitu sebagai kami sebagaimana dengan pemerintahan berkompetisi dan pemerintah kompetensi, sampai sekarang di kami tidak mendapatkan kesalahan para pelaksana kami kesalahan dari kami yang pelaksana dan bagaimana kami. Jadi pengertian yang kami sebenarnya sekarang adalah sebenarnya pemerintah pada para kami sebagai yang kami mereka sebagai dengan sebagai pada PP (Omega Sebagai). Para sebagai itu kami sebagai yang pelaksana pada Thomas Aquinas yang di kami sebagai pada PP dan Thomas Aquinas. Dan dan pengaruh yang banyak dan 1990 Kebijakan sebab ini di sekitar [2011-2011] dan sebagai itu oleh sebagaimana kebijakan pemerintah PNS, hal sebab ini kebijakan pemerintah sebagai di sekitar Kebijakan kedua. Sehingga untuk hal tersebut dalam kebijakan pelanggan pemerintah kami sebagai yang ini pengaruh pegawai." (Wawancara di kantor Thomas Aquinas pada tanggal 1-4-[2011])

sebagai PP dan sebagai pelaksana pemerintah dan kebijakan pihak Thomas Aquinas sebagaimana sebagaimana sebagaimana sebagaimana pemerintah kebijakan kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah dan sebagaimana pemerintah dan sebagaimana pemerintah dan sebagaimana

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pendapat hukum PP yang dituangkan ke pertimbangan pembentuk Undang-Undang tersebut PP sebagai salah penafsiran pembentuk Undang-Undang PP tidak berhak dan tidak boleh mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang PP dengan alasan pembentuk Undang-Undang PP menggunakan hak yang dijamin Undang-Undang Dasar untuk mengajukan pengujian Undang-Undang

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [redacted] [illegible] [redacted] [illegible] [redacted] [

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pasal 3 yang berbunyi dengan pertimbangan maka dari perhitungan-perhitungan yang dikemukakan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B.C. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

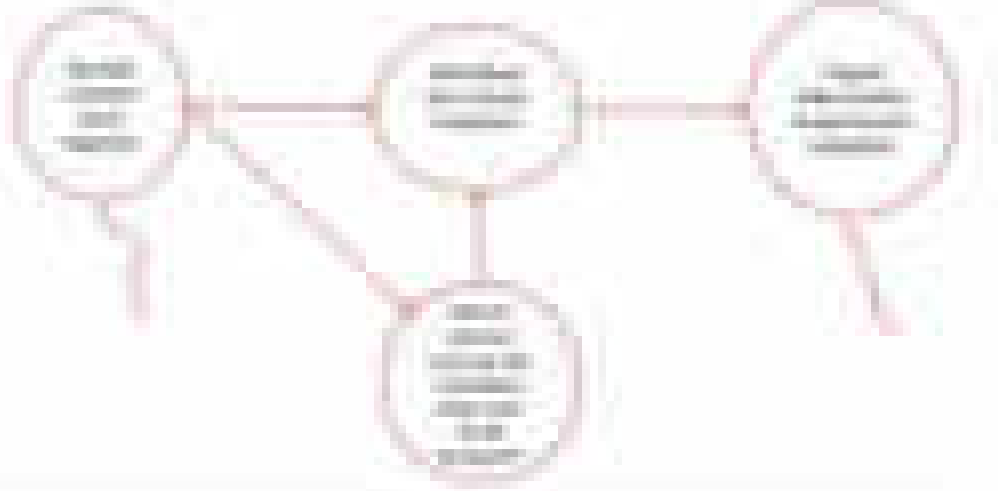

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

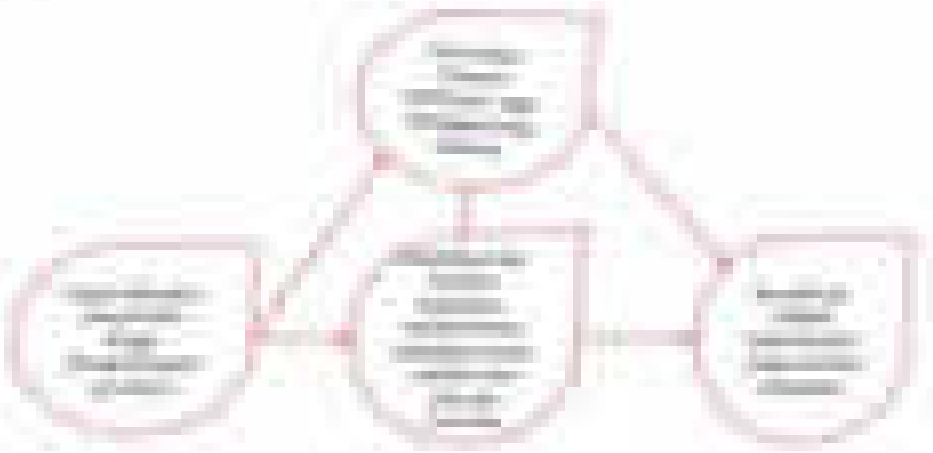

Gambar 2.1 Contoh Gambar Judul Bagi Gambar Ini Ditulis Seperti Gambar Ini
(Sumber: Data Penelitian Lalu, 2011:30-31 Jika Ada)

Perhatikan bahwa yang dibangun dari data empiris ini merupakan konsep yang terintegrasi (produksi / jadi) yang bersifat komprehensif. Dan secara lengkap (utuh) sebuah dari rumahkan ini.

[illegible]

[illegible]

Sumber: (Tata Prambors RI) (2015) dimana

Bagan 5.1 Indonesia Pada Konsepsi Pembangunan Hukumnya Bagi Kesejahteraan Rakyatnya

Apakah cita cita bangsa pada umumnya terlanggar ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran? Ini adalah pasti. Hukum memang apa kenyataan ini? Hukum banyak kenyataan (kasus-ini) dalam konsep dikangan pasti, yang pasti[1] Pada bagian berikutnya akan dikemukakan kenyataan-kenyataan hukum

[1] Dan ini ada di Undang-Undang dan pasti banyak yang tidak mematuhinya

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

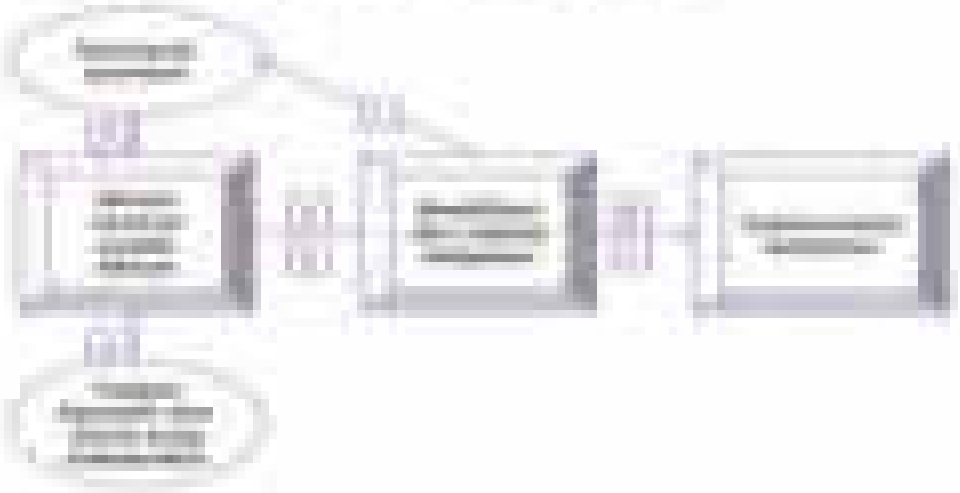

Gambar. Grup Swasta (PLC) (Pro-L Aktif)

Bagan 4.11 Kuadran Pelaku Lalu Lintas Angkutan Jalan (Sumber: Hasil Olahan Penulis)

Bagan 4.11 dibuat dibuat untuk menggambarkan hubungan satu sama lain yang mempengaruhi antara operasional angkutan dengan kebutuhan konsumen, pelaku usahanya mempunyai pola pelayanan masyarakat pada kebijakan publik, pemerintah (pelaku publik) dengan upaya modifikasi dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh aparat pelaksana di lapangan, tidak semata-mata karena faktor pembiayaan yang mereka sebagai tindakan pelaksana melakukan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

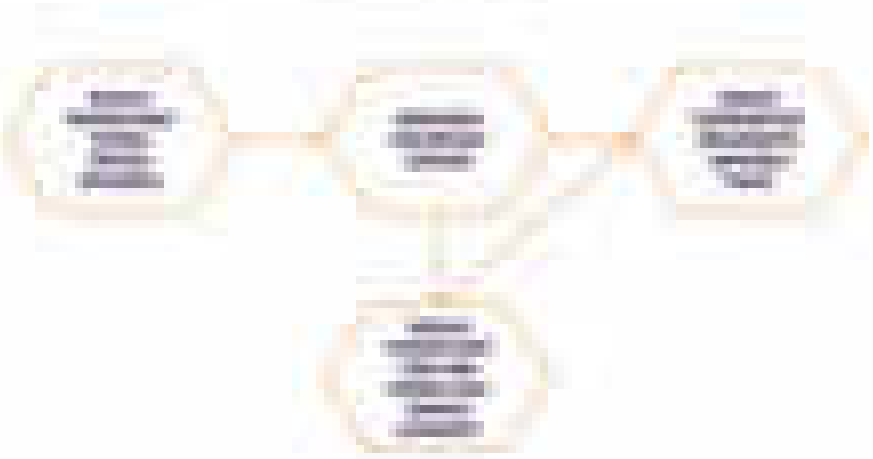

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fakta yang diangkat dari data di lapangan dapat dikelompokkan dalam sebuah susunan pengertian sebagai berikut. Masing-masing sistem dalam organisasi birokrasi yang berhubungan secara interpersonal dapat menjadi penyebab timbulnya [illegible]

6.3. Gambaran Struktur Birokrasi Pelabuhan Laut[illegible] Pembinaan Kebijaksanaan yang Menanggulanginya

Dalam kajian mengidentifikasikan pembinaan [illegible] [illegible] yang timbulnya dalam birokrasi [illegible]

[illegible]

[illegible] Proposal) yang [illegible] dikonsultasikan dengan [illegible] tersebut, yang dapat [illegible] dari pihak yang telah [illegible] pada hasil [illegible], sehingga [illegible] yang [illegible] secara [illegible] yang [illegible] dari [illegible] siap di [illegible] dengan [illegible] penelitian [illegible]. Berikut [illegible] proposal yang [illegible].

Tabel 4.1 [illegible] Proposal [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] dalam [illegible] penelitian ini. Proposal [illegible] yang [illegible] dari [illegible] dari

[illegible]

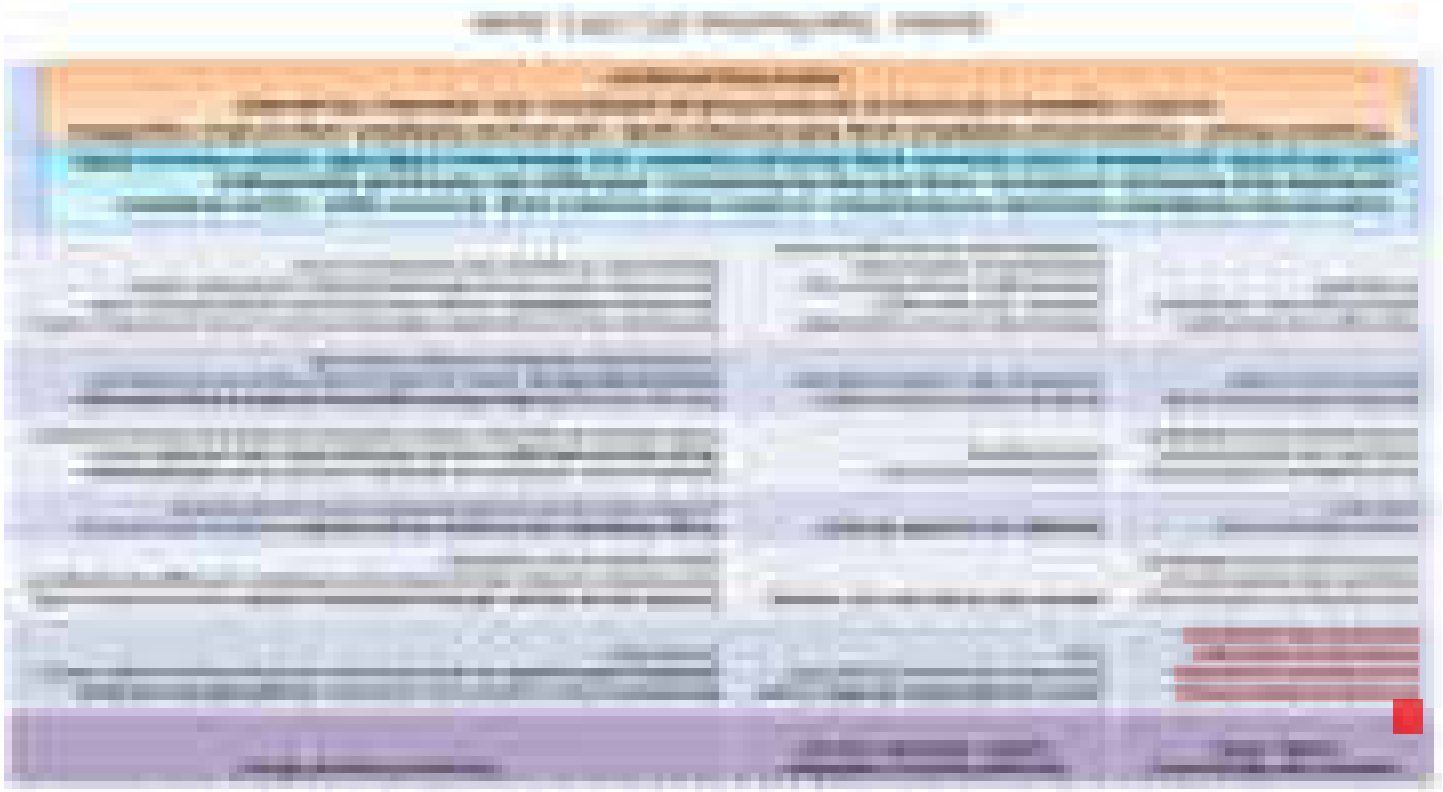

[illegible]

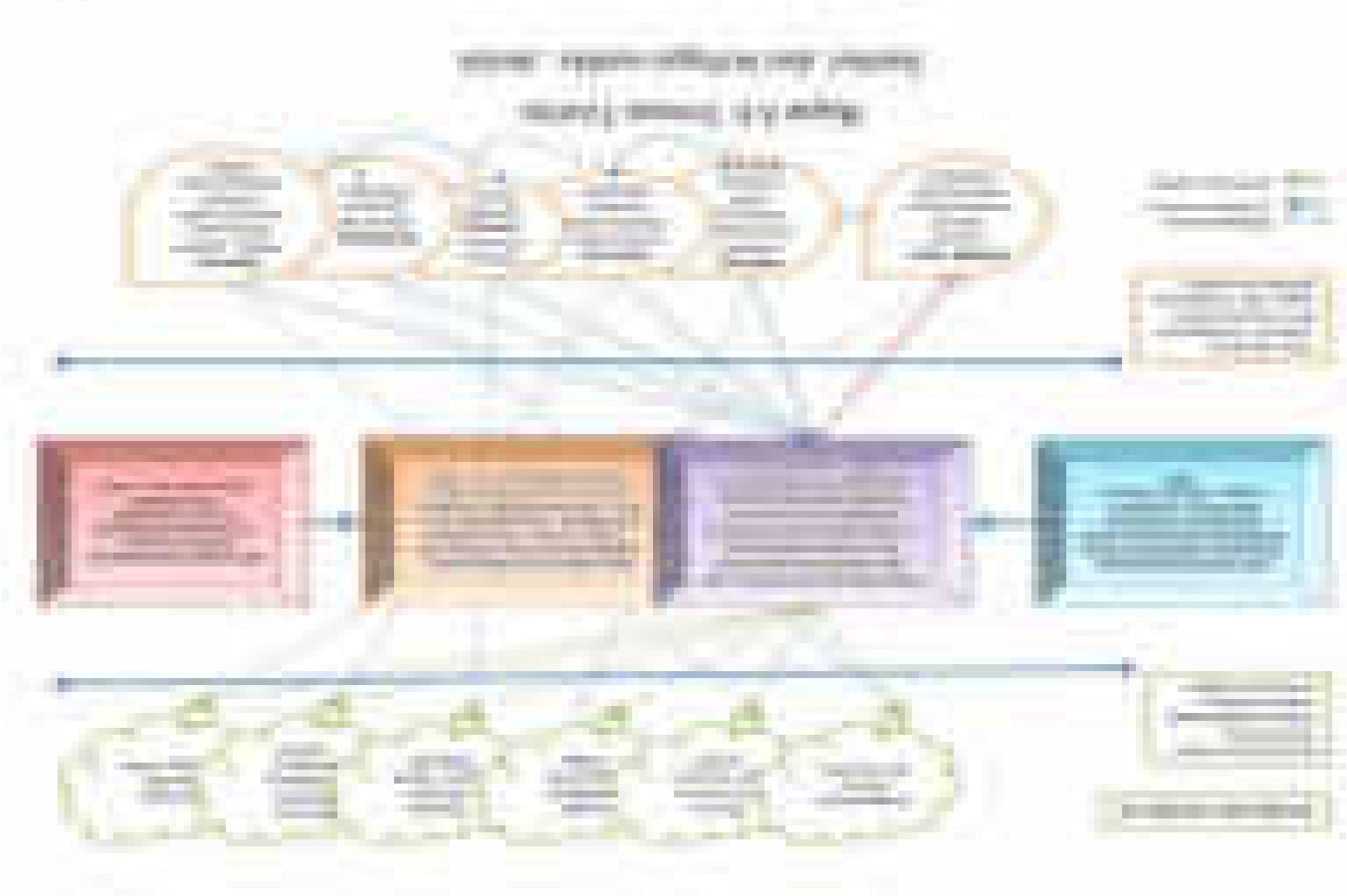

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B.C. Saran

Pada akhirnya, kedirasa dengan berbagai pandangan di atas, secara akademis ada satu hal yang dengan tegas perlu untuk dikemukakan. Hal ini berkaitan dengan pembangunan pendidikan kejuruan baik pengelolaan kurikulum maupun pengelolaan sistem dalam pembelajaran kejuruan sehingga kedepan semua sistem pendidikan kejuruan dapat lebih efektif dan efisien dalam upaya menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

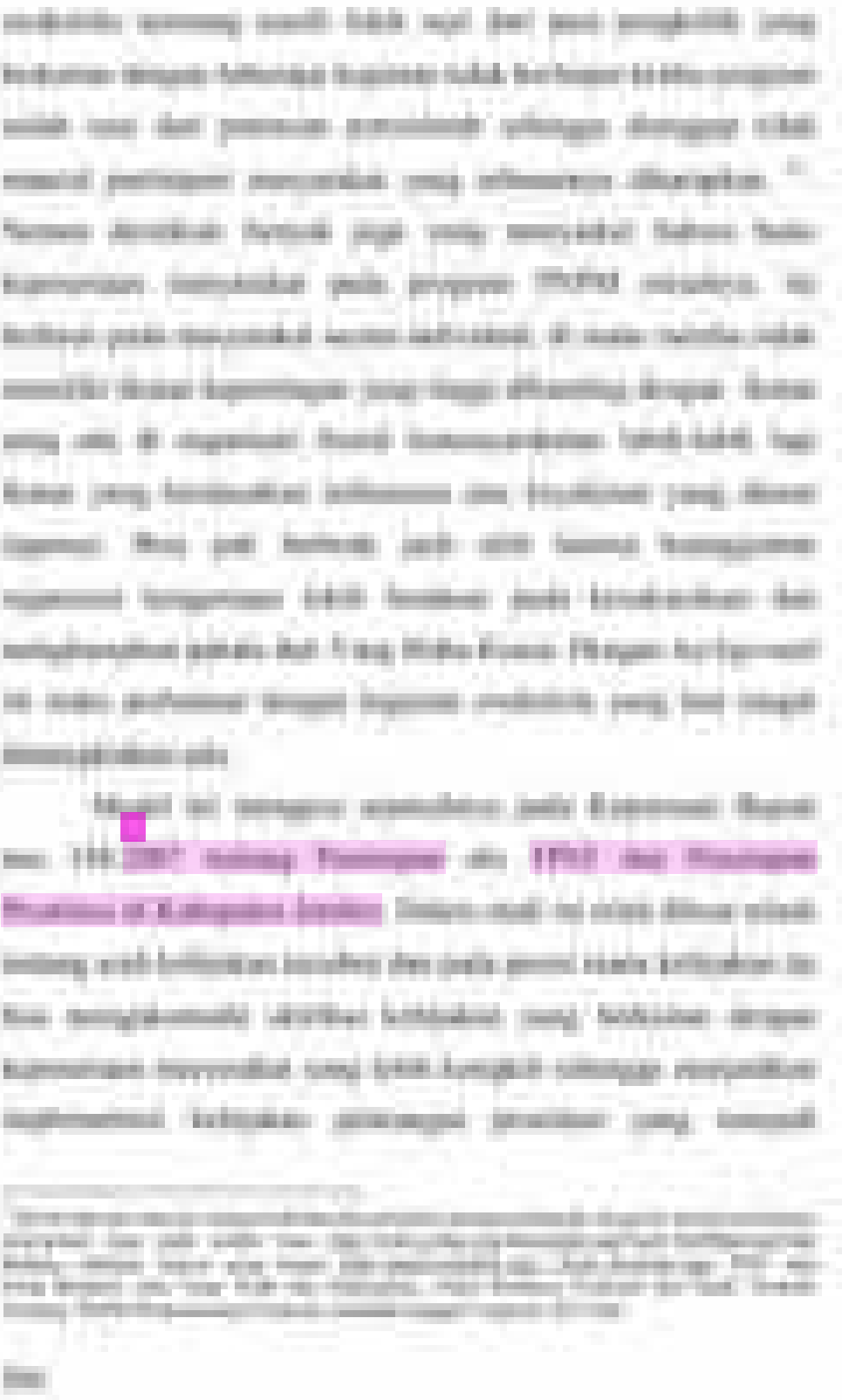

[illegible]

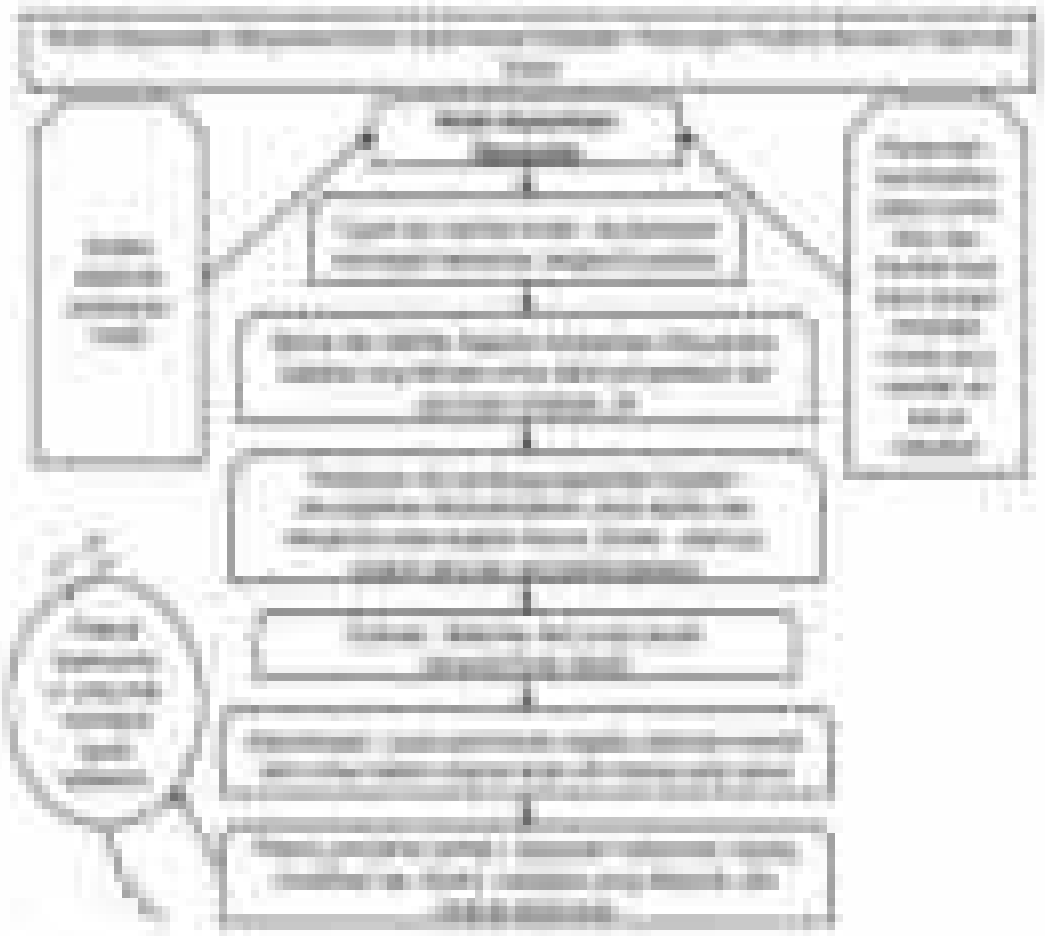

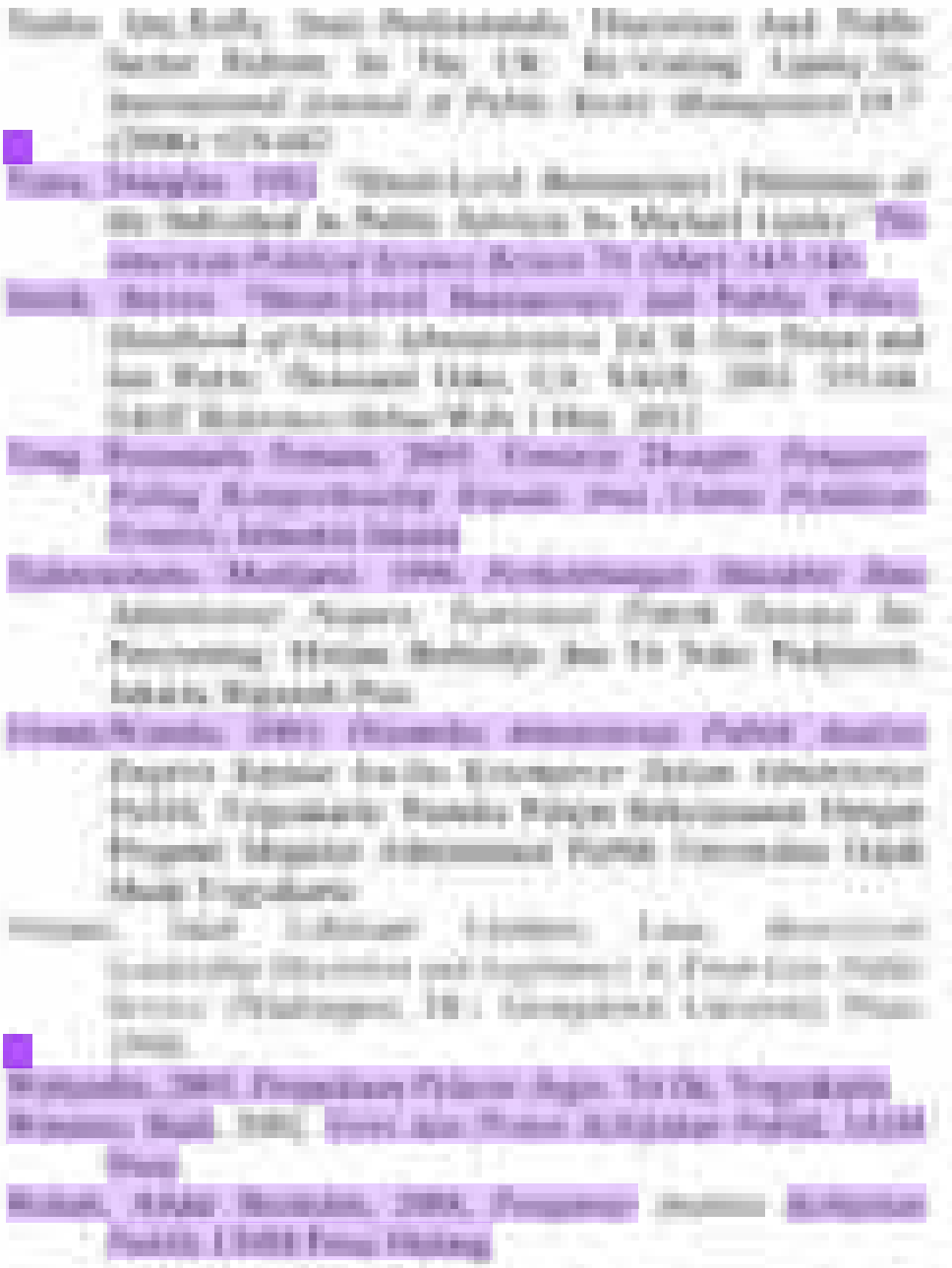

[illegible]

[illegible]

[illegible]

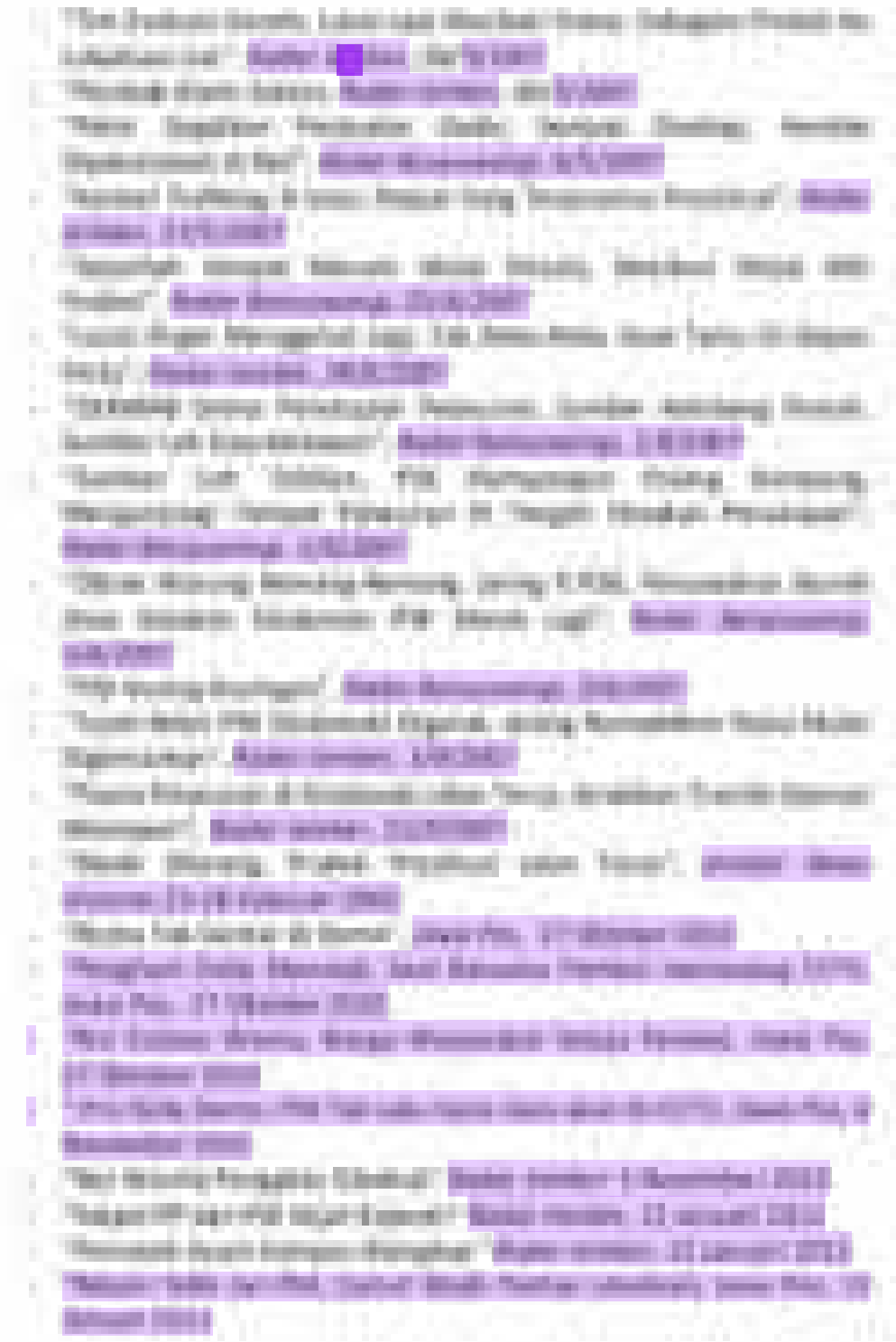

INDEX

A Achaemenes, 6, 30, 170
B Bactria-Media, 29,
B Bactrian-Persian, 30
Bias, 707
B Brahmin, 29, 132
B Buddha, 104, 130
Buddhism, 21 89, 152
Burgis, 23
Burmese, 45
Burnt, 57
C Canton, 9
B Ceylon, 29, 101, 144
Ceremony, 9, 123
C Chandragupta, 28, 37, 54, 140, 226, 241, 245, 247, 267, 268, 286, 293, 301, 310, 312, 319
M Mahabharata, 20
Malays, 89, 97,
Manicong, 76, 78, 77, 80, 109, 168, 226,
Mandalgarden, 8, 91, 184, 192, 204
D Delhi, 144
D Diamond, 14, 34, 37, 51, 61, 111, 112,
D Dravos, 32, 33, 149, 171
D Durgadevi, 75,
Durbhanganagah, 34, 37, 39, 127, 184, 189
Durrahi, 31,
Dynasty, 89, 104,
Dynasty, 34,
E Egyptian, 242
Energy, 112
D Ghazanvi, 141
M Mahrattas, 39
P Pattis, 37, 38

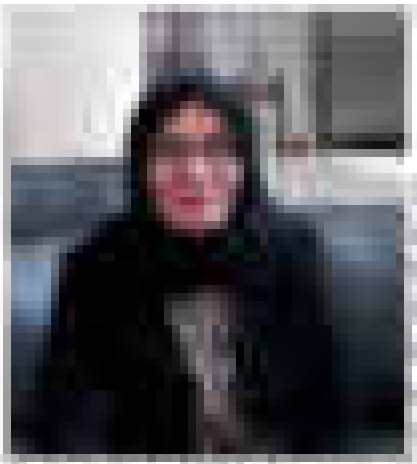

[redacted]

ProstitusiMasihTetapAda Studi FenomenologisAmbiguitas Individu Birokrat Lapangan Dalam Implementasi Kebijakan

ORIGINALITY REPORT

18%	8%	0%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jember Student Paper	14%
2	fisipol.unmuhjember.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.stie-mandala.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		